

SKRIPSI

**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh)**



Diajukan Oleh:

**Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM. 180602028**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teuku Sulthanni Raja Tjoet

NIM : 180602028

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa apabila penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan gagasan pihak yang lainnya tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber lain atau seizin dari pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan penyelewengan dan kecurangan, serta pemalsuan data.*
5. *mengerjakan secara mandiri karya ini dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap karya penulisan ini.*

Bila pada kemudian hari adanya tuntutan dari pihak yang lain atas karya penulisan ini dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bahwa saya melakukan pelanggaran, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan saksi yang lainnya berdasarkan aturan yang telah berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Teuku Sulthanni Raja Tjoet

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah dan
Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)**

Disusun Oleh:

Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM. 180602028

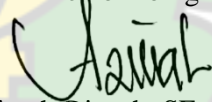
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Pembimbing II,



Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag †

NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kausalitas Astara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM. 180602028

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M
03 Dzulhijah 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Sekretaris II

Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

Penguji I,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Penguji II,

Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si
NIP. 199005242022032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furoqani, M.Sc
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM : 180602028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Juni 2023

Mengetahui,

Penulis

Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM. 180602028

Pembimbing I

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Pembimbing II

Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul : ***“Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh)”***.

Skripsi ini disusun dengan maksud tidak lain hanyalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan dan semangat yang telah diberikan, secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE.,M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing ke II yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas kebaikan bapak dan ibuk selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya penulis berdoa, semoga Allah yang membalas kebaikan bapak dan ibuk.
5. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Terima kasih yang tidak terhingga sebesar-sebesarnya penulis utarakan kepada Ibunda, Ayahanda, abang, kakak, adik, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat,waktu, doa, cinta serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga kepada penulis.

8. Ucapan terimakasih banyak kepada Kakak Falaah Muriza S.H dan Siti Sarah Amd,Kep yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu pelunus mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terimakasih atas semua yang membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini selesai sebagaimana mestinya. Kepada seluruh pihak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang baik. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal' Alamiin.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM. 180602028

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	□
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

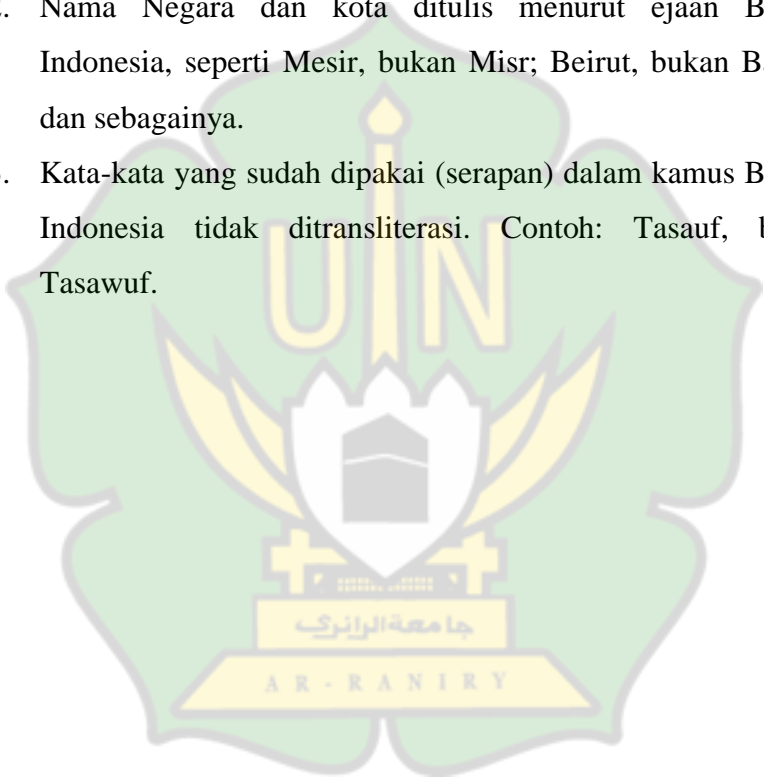
- Ta *marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*
alMadīnatul Munawwarah
 طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Teuku Sulthanni Raja Tjoet
NIM : 180602028
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh)
Pembimbing I : Khairul Amri, SE., M.Si
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data panel dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2013-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis kausalitas dan metode *Granger Causality Test* dengan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan maka tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah akan tetapi jika Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan syariah dalam pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan. kesejahteraan di peroleh ketika seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam Islam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor SDM dan faktor teknologi. Di Provinsi Aceh faktor SDM yang di lihat dari IPM dan faktor teknologinya sudah cukup baik karena mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

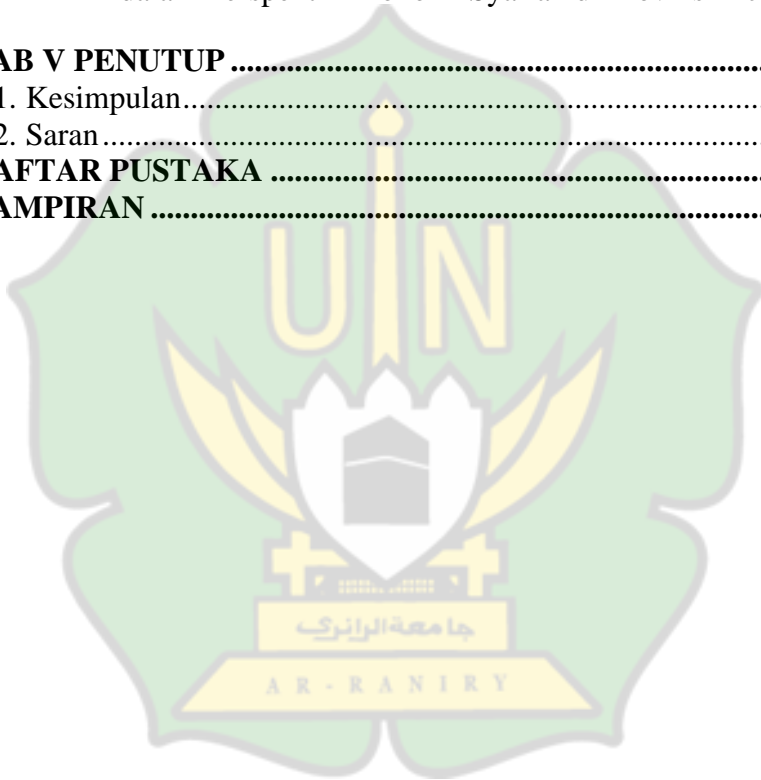
Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Panel Granger Causality Test*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASA TEORI.....	17
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.4. Faktor-faktor Yang Menentukan Pertumbuhan \Ekonomi	25
2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam	28
2.2. Pendapatan Asli Daerah	31
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	31
2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	35
2.2.3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	41

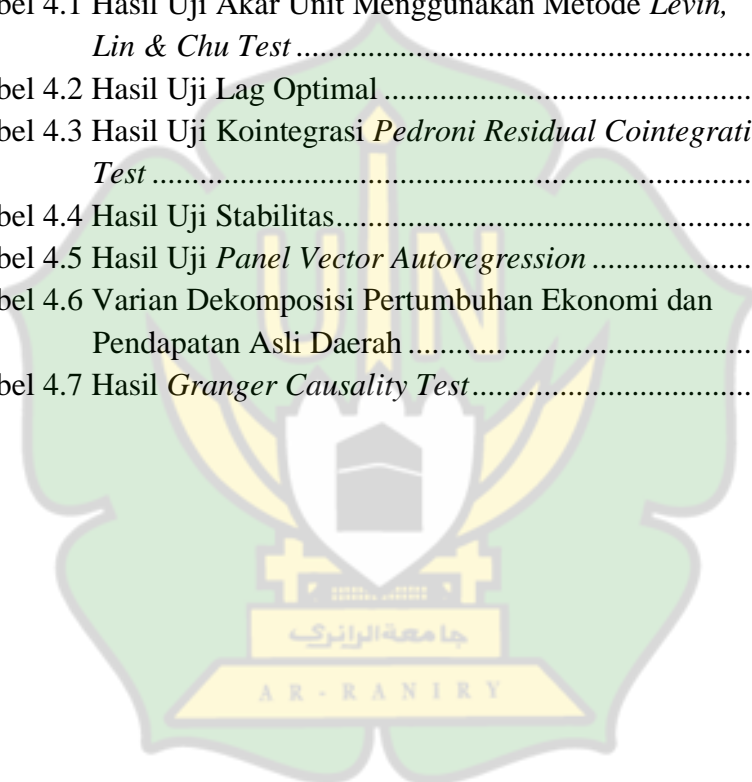
2.3. Penelitian Terkait.....	44
2.4. Keterkaitan Antar Variabel.....	62
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	62
2.5. Kerangka Pemikiran	63
2.6. Hipotesis Penelitian.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1. Jenis Penelitian	65
3.2. Sumber Data	65
3.3. Populasi	66
3.4. Metode Pengumpulan Data	66
3.4.1. Metode Dokumentasi	66
3.4.2. Metode Kepustakaan.....	66
3.5. Operasional Variabel	67
3.5.1. Pendapatan Asli Daerah.....	67
3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi	67
3.6. Metode Analisis Data	68
3.6.1. Uji Stasioneritas Data	70
3.6.2. Penentuan Panjang Lag Optimum.....	71
3.6.3. Uji Stabilitas	71
3.6.4. Uji Kointegrasi	71
3.6.5. Estimasi PVAR.....	72
3.6.7. Uji Kausalitas Granger	72
3.6.8. <i>Impulse Response Function</i>	73
3.6.9. <i>Variance Decompositions</i>	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
4.1. Statistik Deskriptif.....	75
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	75
4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	78
4.2. Analisis VAR.....	79
4.2.1. Uji Stasioneritas Data	79
4.2.2. Penentuan Panjang Lag Optimum.....	80
4.2.3. Uji Kointegrasi	81
4.2.4. Uji Stabilitas Vector Autoregression	83
4.2.5. Hasil Uji Panel Vector Autoregression.....	83
4.2.6. Hasil analisis <i>Impulse Response Function (IRF)</i>	86

4.2.7. Hasil Analisis <i>Varian Decomposition</i> (VD).....	88
4.2.8. Uji Kausalitas Granger	90
4.3. Pembahasan	91
4.3.1. Hubungan Kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh (2013-2020).....	91
4.3.2. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Provinsi Aceh	94
BAB V PENUTUP	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	110



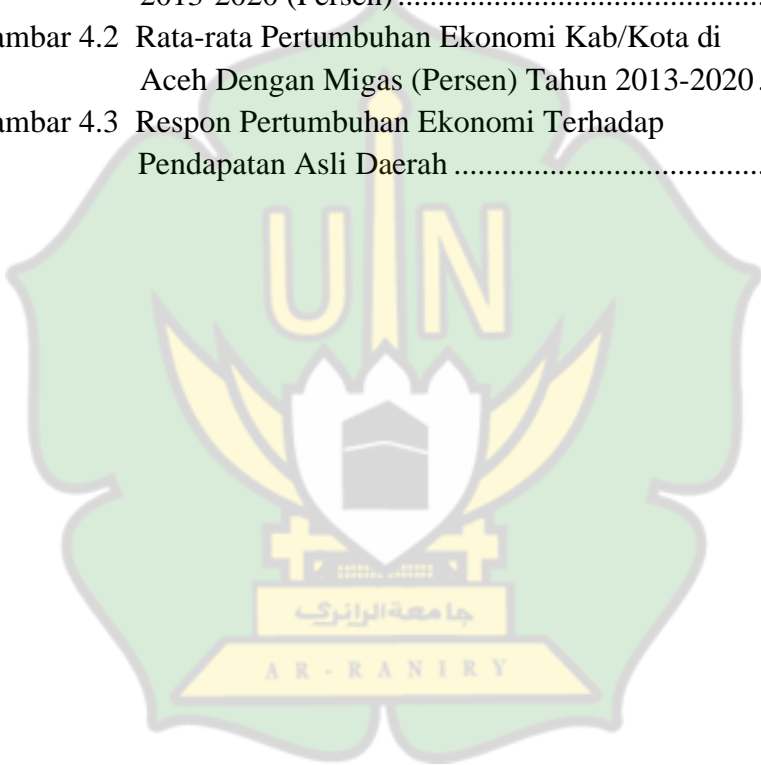
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	30
Tabel 4.1 Hasil Uji Akar Unit Menggunakan Metode <i>Levin, Lin & Chu Test</i>	82
Tabel 4.2 Hasil Uji Lag Optimal	83
Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi <i>Pedroni Residual Cointegration Test</i>	84
Tabel 4.4 Hasil Uji Stabilitas.....	85
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Panel Vector Autoregression</i>	47
Tabel 4.6 Variasi Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah	85
Tabel 4.7 Hasil <i>Granger Causality Test</i>	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	63
Gambar 3.1	Tahapan Analisis Data	69
Gambar 4.1	Rata-rata Kontribusi Realisasi PAD Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2013-2020 (Persen)	77
Gambar 4.2	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Aceh Dengan Migas (Persen) Tahun 2013-2020..	78
Gambar 4.3	Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Panel	110
Lampiran 2: Hasil Output Eviews	116
Lampiran 3 : Biodata	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah memberdayakan suatu daerah untuk mengambil keputusan daerah agar lebih leluasa mengelola sumber daya yang memiliki potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama daerah harus segera diubah, karena suatu saat sumber daya alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain di wilayahnya untuk dijadikan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah secara optimal diperlukan dana yang cukup (Atteng et al. 2016).

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertimbangan dana dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah dan cikal bakal penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat tugas pokok maupun tugas pembantuan, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sepanjang terdapat keseimbangan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan utama daerah berasal dari pajak daerah, pemungutan

daerah, hasil usaha pemisahan kekayaan daerah, dan pendapatan utama daerah lainnya yang sah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, maka akan meminimalkan ketergantungan daerah pada bantuan pusat. Daerah berhak menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Purba & Ginting, 2016).

Dalam konteks ini, otonomi daerah dapat dianggap sebagai konsep pembangunan, pemberian kewenangan yang luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Dengan adanya pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, kebutuhan tambahan PAD juga meningkat dengan adanya transfer orang, peralatan, dana dan dokumen dalam jumlah besar ke daerah. Keseimbangan dukungan pemerintah pusat hingga daerah terhadap otonomi daerah, meski cukup memadai, harus menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam belanja APBD (Nasir, 2019).

Oleh karena itu, setiap daerah di haruskan mampu untuk menelusuri setiap potensi-pontensi atau sumber-sumber PAD secara keseluruhan. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat di tinjau dari tingginya pengawasan pemerintah pusat terhadap suatu proses pembangunan daerah. Ini dapat dilihat jelas dari tingkat keseimbangan PAD dari total pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat subsidi yang besar dari pemerintah. Tujuan dari PAD sendiri adalah memberdayakan

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah, sebagai wujud dari desentralisasi (Montolalu & M. Ruru, 2017).

Setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda untuk mendanai berbagai kegiatan, sehingga menimbulkan kesenjangan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer dari APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (UU RI No. 23 Tahun 2014), Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah yang penyalurannya menekankan pada aspek kewajaran dan keadilan pengelolaan administrasi. Perimbangan keuangan pusat dan daerah pada hakikatnya meliputi distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh berdasarkan prinsip desentralisasi, desentralisasi, dan perencanaan secara menyeluruh (Muttaqin et al. 2021).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan PAD dapat dilihat bagaimana suatu provinsi menggali sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipilah, dan PAD lain yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan digunakan untuk pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak adalah kewajiban yang wajib dibayar oleh warga negara Indonesia. Pajak adalah sumbangan wajib kepada daerah oleh individu atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak untuk menerima ganti rugi secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kepentingan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut itu tergantung pada jenis objek pajak daerahnya sendiri, tarif pajak daerah, serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan retribusi daerah itu sepenuhnya di atur oleh pemerintah daerah dalam menentukan jumlah maksimum berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jumlah dan jenis objek pajak itu tergantung pada kondisi perekonomian daerah tersebut. Supaya PAD yang berupa pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, perekonomian di daerah tersebut harus di didesak agar mampu berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengadakan pungutan berupa pajak dan retribusi daerah dalam hal meningkatkan keuangan daerah tersebut. Aset tetap adalah aset yang masa kerjanya melebihi 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau kepentingan umum, dan aset yang

nilai perolehannya dapat diukur secara andal tidak diperdagangkan. Pengelolaan aset milik daerah atau barang milik daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (H. Umar, et al, dikutip dalam Purba & Aziza, 2019).

Dalam menentukan hukum suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya adalah berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqhi menyatakan *kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus*. Maka dari itu, dasar itulah yang dapat dijadikan pedoman untuk pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki. Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nashsyara yang tidak menunjukkan, diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang (Turmudi, 2015).

Menurut ekonomi Islam, suatu negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

sehingga setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, negara harus mengatur penggunaan sumber daya ekonomi agar dapat didistribusikan secara adil dan merata, sehingga anggota masyarakat tidak akan ditindas oleh negara atau sesama warganya dalam memperoleh sumber daya ekonomi.

Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat An-Nahl (16):90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”*(QS : An-Nahl/16:90).

Tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa, (Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka disebutkan secara khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina (dan kemungkar) menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan

permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih di jauhi; dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangannya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dari hal tersebut. Di dalam lafal tadzakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal. Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Alquran.

Maka dari itu, Negara berhak untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melakukan kegiatan ekonomi tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh individu-individu tersebut. Dengan demikian, peran Pendapatan Asli Daerah dapat perbaiki lebih lanjut di masa mendatang. Dengan bertambahnya penerimaan dari Pajak dan PAD lainnya, maka secara kolektif dapat mendukung pendapatan daerah untuk mendanai pembangunan di Provinsi Aceh.

Pada dasarnya, pendapatan asli daerah di setiap daerah itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kemampuan daerah tersebut dalam menggali sumber pendapatan dan mengolah sumber daya yang ada sehingga nantinya akan digunakan untuk meningkatkan

pelayanan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah di Aceh umumnya setiap tahun mengalami kenaikan, yang mana tujuannya ialah agar dana tersebut dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin. Realisasi pendapatan asli daerah tersebut pada tahun 2019 ialah sebesar 2,54 triliun rupiah, dan pada tahun 2020 ialah sebesar 2,57 triliun rupiah, dimana realisasi pendapatan asli daerah itu sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Angka tersebut tergolong rendah. Artinya, Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Kedepannya, diharapkan pemerintah Aceh mengerahkan segala sumber daya yang ada dan melakukan strategi pembangunan yang tepat agar kemandirian daerah perlahan dapat terwujud (BPS Aceh, 2021).

Darnawaty & Purnasari (2019), mengemukakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah provinsi lebih memahami kebutuhan dan tingkat pelayanan masyarakat di daerah, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Meningkatnya fragmentasi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia, sehingga penganggaran harus memprioritaskan alokasi pengeluaran untuk tujuan ini. Pendidikan dan sumber daya manusia memiliki dua

faktor kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia adalah seperangkat sumber daya yang menggabungkan pengetahuan, pelatihan, dan keterampilan yang terkait dengan pendidikan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi memberikan tingkat pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil juga memiliki efek jangka panjang, yang penting untuk mendorong pembangunan manusia. Peningkatan pendapatan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas sosial, pendidikan dan sanitasi dapat mendorong pembangunan manusia selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor input dan tujuan utama dari proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi akan memberikan *multiplier effect* pada semua aspek kehidupan, seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya suatu masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan mendorong kegiatan ekonomi yang menggairahkan, merangsang pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Situasi ini akan memiliki konsekuensi logis untuk menciptakan semua faktor atau faktor penarik bagi penduduk di Provinsi Aceh dengan pertumbuhan tinggi dan berpenghasilan rendah untuk mencari pekerjaan di daerah berpenghasilan tinggi (Suartha & Yasa, 2017).

Beberapa faktor mendorong dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian adalah pengeluaran pemerintah, yang merupakan salah satu alat kebijakan fiskal, yang merupakan bentuk peran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengeluaran. Pemerintah beralih ke sektor produktif untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga akan meningkatkan permintaan output barang dan jasa. Ekspor bersih angka positif untuk dapat memberikan surplus pada neraca jual beli (Fajrin & Sudarsono, 2019).

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan seluruh masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu peningkatan semua nilai tambah yang terjadi. Ini merupakan indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Semua nilai tambah atau pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti pengangguran, inflasi dan pertumbuhan penduduk. Ini berarti bahwa pengangguran, inflasi, dan jumlah penduduk semuanya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Azulaidin, 2021).

Tabel 1. 1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh

PDRB	2019	2020
Harga Berlaku (Rp)	164,17 triliun	166,38 triliun
Harga Konstan Migas (Rp)	132,07 triliun	131,59 triliun
Harga Konstan Tanpa Migas (Rp)	125,91 triliun	124,98 triliun

Sumber : BPS Aceh (diolah 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa perekonomian Aceh dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2020 (dengan migas) tercatat sebesar 166,38 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan sedikit peningkatan nilai PDRB dibandingkan PDRB ADHB pada tahun 2019 mencapai 164,17 triliun rupiah. Adanya pertumbuhan volume dan kenaikan harga barang dan jasa sebagai pemicu perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Aceh terus bertambah. Tanpa memasukkan nilai migas, PDRB ADHB Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 161,30 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 (dengan migas) Provinsi Aceh pada tahun 2020 mencapai 131,59 triliun rupiah, menurun dibandingkan nilai tahun 2019 yang mencapai 132,07 triliun rupiah. Sedangkan tanpa migas, nilai PDRB ADHK-2010 tahun 2020 mencapai 124,98 triliun rupiah, berkurang 0,93 triliun rupiah dari nilai PDRB ADHK-2010 tahun sebelumnya. Dengan

demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh negatif dengan migas dan tanpa migas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wullur et al. (2019) menyimpulkan bahwa dengan percepatan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan suatu daerah juga akan meningkat, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah provinsi tersebut, dan sebaliknya meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi. Maka dari itu hubungan sebab akibat yang terjadi bersifat dua arah, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel Pendapatan Asli Daerah, serta variabel Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi berubah maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah berubah maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu hal ini menarik dikaji kembali dengan variabel yang sama namun di wilayah penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “**Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kabupaten/Kota di Aceh)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang analisis kausalitas antara pertumbuhan

ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah di Provinsi Aceh.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai analisi kausalitas Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kausalitas Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah di Provinsi Aceh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyumbang bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari proposal skripsi dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ingin dikaji di dalam penelitian ini. Dari latar belakang yang diuraikan tersebut kemudian dikemukakan pula rumusan masalahnya sebagai titik utama penelitian.

Selain itu peneliti juga memberi gambaran tentang tujuan dari penelitian beserta manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam proposal skripsi ini. Untuk memperkuat penelitian ini penulis juga menyertakan temuan-temuan penelitian terdahulu yang terkait. Kemudian penulis menetapkan kerangka pemikiran yang nantinya menjadi patokan dasar dalam melakukan penelitian serta dilengkapi dengan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, yang disertakan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian penulis menguraikan mengenai metode analisis yang disertakan dengan langkah yang akan dijalankan dalam melakukan analisis terhadap data yang digunakan.

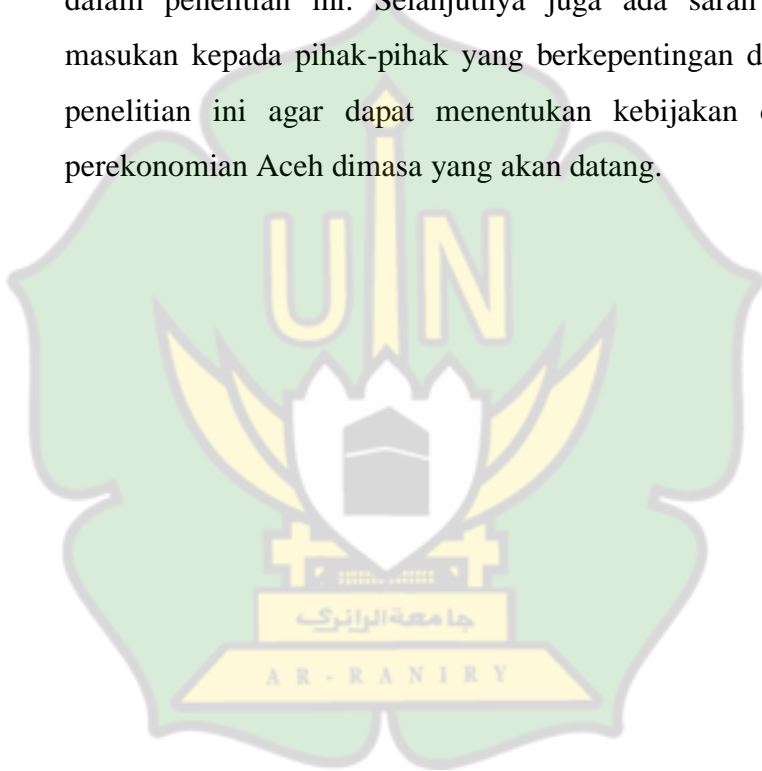
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memuat penjelasan secara singkat tentang gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya memuat tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari

pengolahan data, yang akan menjawab jawaban dari rumusan masalah pada bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sekaligus merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya juga ada saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini agar dapat menentukan kebijakan dalam perekonomian Aceh dimasa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah satu proses di mana keluaran ekonomi terus meningkat atau keadaan ekonomi suatu negara sentiasa berubah, yang dimanifestasikan sebagai peningkatan pendapatan negara dalam jangka masa tertentu (Indayani & Hartono, 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fenomena penting di dunia sejak zaman modern. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang. Artinya, dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin dalam peningkatan output per kapita sekaligus memberikan banyak pilihan untuk mengkonsumsi barang dan jasa, dengan konsekuensi peningkatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan merupakan perkembangan satu dimensi yang diukur dengan peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan. Dalam hal ini berarti peningkatan pendapatan nasional ditunjukkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Sebagai negara berkembang, Indonesia secara aktif mendorong pembangunan yang terencana dan bertahap, tidak mengabaikan upaya yang adil dan stabil. Pembangunan nasional

ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua orang (Syahputra, 2017).

Jawangga (2018) mengemukakan dalam bukunya bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan ekonomi. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah total output barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode tertentu (misalnya satu tahun). Setiap negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Upaya ini bertujuan untuk mengarahkan negara ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas produksi suatu negara selama periode waktu tertentu. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pendapatan nasional riil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Dalam jangka panjang, pendapatan per kapita riil akan meningkat.
- c. Kesejahteraan penduduk meningkat dari waktu ke waktu.
- d. Jumlah tenaga kerja dalam proses produksi bertambah.

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Dampak pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat taraf hidup masyarakat. Jika taraf hidup masyarakatnya membaik, maka negara tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Di negara atau sistem ekonomi mana pun,

pertumbuhan ekonomi adalah bagian terpenting dari kebijakan ekonomi. Secara keseluruhan, dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengarah pada lebih banyak kesempatan dan pemerataan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi dunia selama dua abad terakhir telah membawa dua efek yang sangat penting, yaitu : pertama, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat dunia, kedua, terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya (Muttaqin R. , 2018).

2.1.2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diamati dan diukur dengan membandingkan komponen-komponen yang dapat mewakili keadaan perekonomian suatu negara saat ini dan periode sebelumnya. Dalam hal ini terdapat empat komponen atau indikator yang bisa digunakan antara lain adalah :

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Jika Produk Nasional Bruto (GNP) atau *Gross National Product* (GNP) dihitung dari pendapatan yang diperoleh suatu negara dari warganya di mana Produk Domestik Bruto (PDB) diperoleh dari Negara berdasarkan pendapatan wilayah atau batas teritorialnya. Oleh karena itu, semua produksi ekonomi yang berlangsung dan terjadi di suatu negara, baik oleh warga negaranya maupun orang asing, dimasukkan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto

(PDB). Namun, pendapatan yang dihasilkan oleh WNI yang bekerja di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan PDB (Ahmad, 2021). Dalam buku karya Jawangga (2018) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan produksi barang dan/atau jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi identik dengan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui pertumbuhan kuantitas barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai moneter yang dihasilkan untuk komoditas tersebut. Dasar perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB). PDB digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena PDB menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai persentase. Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:

$$r_{(t-1, t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Keterangan :

r = Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase.

PDB_t = Pendapatan nasional pada tahun berjalan

PDB_{t-1} = Pendapatan nasional pada tahun sebelumnya

2. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah Negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu Negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu Negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi Negara tersebut dianggap sedang meningkat.

3. Kesejahteraan Penduduk

Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan riil per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu Negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga semakin merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana.

4. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi Negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja. Dimana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, produktivitas Negara pun ikut meningkat.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang yang sudah lama dibahas dan dikaji oleh para pakar ekonomi. Dikutip dalam buku karangan Jawangga (2018), dimana secara umum teori pertumbuhan ekonomi diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Klasik

Para ekonom klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas lahan dan kekayaan sumber daya alam, serta kemajuan teknologi. Meskipun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada banyak faktor, para ekonom klasik berfokus pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Tokoh-tokoh ekonomi klasik yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Adam Smith

Adam Smith, seorang pelopor ekonomi klasik, mempertimbangkan proses pertumbuhan ekonomi dari perspektif jangka panjang. Smith menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis melalui dua faktor, yaitu faktor pertumbuhan output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Kedua faktor ini berinteraksi sepanjang proses pertumbuhan ekonomi. Ide-idenya dituangkan dalam sebuah buku berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776).

b. David Ricardo

David Ricardo mengatakan peningkatan faktor pertumbuhan penduduk akan menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Surplus tenaga kerja menyebabkan upah turun. Upah hanya dapat digunakan untuk membiayai standar hidup minimum. Akibatnya, kondisi ekonomi akan terhenti di beberapa titik. David Ricardo menulis idenya dalam sebuah buku berjudul *Principles of Politics and Taxation*.

2. Teori Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini dikembangkan atas dasar analisis pertumbuhan menurut perspektif ekonomi klasik. Dalam teori neoklasik, faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian tenaga kerja. Teori neoklasik dikembangkan dari karakter berikut :

a. Joseph A. Schumpeter

Joseph A. Schumpeter adalah seorang ekonom neoklasik terkenal. Menurut hasil pemikirannya, proses pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan pengusaha. Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan, terutama di sektor industri dan perdagangan. Schumpeter mengungkapkan gagasannya dalam sebuah buku berjudul *The Theory of Economic Development*, yang membahas tentang peran wirausahawan dalam pembangunan.

c. Robert Merton Solow

Robert Merton Solow adalah seorang ekonom di *Massachusetts Institute of Technology*. Dia dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1987 untuk karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Solow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber dari manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output). Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia yang positif.

3. Teori Historis

Dalam teori sejarah, kegiatan ekonomi didasarkan pada interaksi sosial. Pemerintah berperan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. Teori sejarah ini dikemukakan oleh para ahli berikut:

a. Walt Whitman Rostow

Ekonom Amerika dan ilmuwan politik Walt Whitman Rostow. Dalam sebuah buku berjudul *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*. Rostow menggambarkan proses pembangunan sosial ekonomi. Proses pembangunan sosial dan ekonomi telah melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Masyarakat tradisional.
- b) Tahap prasyarat tinggal landas.
- c) Tahap tinggal landas.

- d) Tahap menuju kedewasaan.
 - e) Tahap konsumsi tinggi.
- b. Karl Wilhem Bucher

Karl Wilhem Bucher adalah seorang ekonom dan sejarawan dunia. Secara teori, ia mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi menurut jarak yang ditempuh untuk memenuhi permintaan, dari produsen ke konsumen.

2.1.4. Faktor-faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana keadaan perekonomian suatu negara terus berubah menjadi keadaan yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang benar-benar berperan besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah :

1. Sumber Daya Alam

Kehadiran sumber daya alam seperti minyak atau mineral dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan potensi produksi suatu negara. Hal yang sama berlaku untuk keberadaan tanah, air, hutan dan gas alam. Secara logika, sangat sulit untuk meningkatkan jumlah sumber daya alam di suatu negara. Oleh karena itu, negara perlu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama jika sumber daya tersebut tergolong sulit untuk diperbarui (Destiana, 2022).

2. Sumber Daya Manusia

Tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadikannya lebih terampil dan terlatih. Kualitas sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan membantu meningkatkan produktivitas usaha. Jika banyak bisnis yang berkembang, tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Budi, 2020).

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal meliputi tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi dan media lainnya. Pembentukan modal adalah proses dimana semua produk buatan manusia diproduksi. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam tenaga kerja dan dapat meningkatkan proporsi modal atau tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Pustikom, 2020).

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat proses pembangunan. Pergeseran dari paradigma kerja berbasis tangan yang

semula telah digantikan oleh mesin-mesin kompleks yang berimplikasi pada efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan yang pada gilirannya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Pojah, 2022).

5. Faktor Sosial dan Politik

Faktor sosial meliputi adat, tradisi, nilai dan kepercayaan, yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Situasi politik suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika suatu negara stabil secara politik dan berfungsi dengan baik, ia memberikan kenyamanan bagi rakyatnya dan mendukung peningkatan produktivitas. Akibatnya, masyarakat akan bebas berinovasi dan mengembangkan potensinya secara maksimal, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi (Ichsanti, 2022).

6. Faktor Budaya

Faktor ini dapat menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi dan juga penghambat. Dampak budaya terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada jenis budaya yang ada. Misalnya, budaya masyarakat yang baik, seperti kejujuran, etos kerja yang tinggi, dan lain-lain, tentu meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, budaya seperti korupsi, kemalasan, dll justru bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Lyman, 2021).

2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, isu pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini bersumber dari firman Allah SWT. Berikut potongan Surah Hud ayat 61:

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

Artinya: *Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.* (Hud/11:61, Kemenag, 2019).

yang dimaksud bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Istilah ‘pemakmuran bumi’ ini mencakup pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”*

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang tepat yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, menurut Islam, pertumbuhan ekonomi adalah masalah nilai. Misalnya, peningkatan yang dialami suatu faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika

produksi tersebut termasuk komoditas yang terbukti merugikan dan membahayakan manusia. Apalagi, perubahan ekonomi merupakan kegiatan menyeluruh di bidang produksi yang erat kaitannya dengan pemerataan. Pertumbuhan mencakup aspek yang lebih luas dari pertumbuhan dan kemajuan manusia, baik material maupun spiritual. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi kehidupan manusia, tetapi juga aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, pertumbuhan ekonomi dirancang untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, hak asasi manusia dan landasan martabat manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam bersifat multi dimensional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi di dunia ini, tetapi kesejahteraan di dunia yang akan datang. Menurut Islam, keduanya terintegrasi secara utuh (Muttaqin R. , 2018).

Menurut Zuhdi (2008), terdapat perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara konsep ekonomi Islam dan kapitalis. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari perspektif yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Ada juga sikap terhadap kepuasan barang dan jasa yang tidak terbatas, jauh dari konsep dasar kapitalisme yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan material yang tidak terbatas. Berbeda dengan Islam, meskipun memandang kebutuhan akan materi, Islam tidak melupakan faktor moral dan spiritual, juga tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam, manusia bukan

hanya hidup di dunia ini, tetapi juga akan hidup di akhirat kelak. Sikap ini tertanam dalam kehidupan sosial, politik atau ekonomi sejak awal.

Ada empat prinsip bagi pertumbuhan dalam Islam, yaitu:

1. Tauhid

Konsep tauhid adalah untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia harus taat kepada Allah SWT, Ketaatan manusia kepada Allah terlihat dalam perilaku atau perbuatannya, menaati perintah Allah dengan ikhlas dan tuntas serta meninggalkan larangan-Nya.

2. Rububiyyah

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah penguasa dunia ini. Allah yang berkuasa membuat aturan untuk memastikan dan membimbing kehidupan manusia agar sempurna dan sejahtera. Allah juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung dan mengatur kehidupan semua makhluk dengan sempurna.

3. Khalifah

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi. Tugas utamanya adalah untuk bertindak sebagai pemegang amanah Allah dalam segala hal, dari segi moral, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh mengganggu alam ini. Pembangunan yang perlu dilakukan ialah memberi kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui para nabinya. Oleh itu,

manusia mesti mengelakkan perkembangan yang berpotensi merosakkan, yaitu perkembangan yang membawa kepada keruntuhan, huru-hara dan ketidakadilan. Selain akidah, asas yang paling utama dalam menjalankan tugas khalifah ialah ilmu. Pengetahuan yang diharapkan ialah pengetahuan tentang realiti fizikal. Mengubah kedudukan ilmu bermakna ia telah berubah kedudukan asalnya dan perubahan yang dilakukan kepada sunnatullah maka ilmu itu akan musnah bukannya diperbaiki.

4. Tazkiyah

Tazkiyah merupakan mekanisme utama pertumbuhan, termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses pemurnian dinamis yang perlu dilakukan setiap orang jika memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Manusia perlu mensucikan hubungannya dengan Allah, manusia dengan manusia, dan makhluk lainnya di dunia

Keempat prinsip tersebut di atas merupakan pijakan utama dari nilai etika pembangunan manusia di muka bumi, karena keempat prinsip tersebut sudah mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan material dan spiritual, sebagai dasar ekonomi berbasis syariah.

2.2.Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah otonom diberkahi dengan kekuasaan dan kewenangan pemerintah

untuk mengurus daerahnya sendiri. Menghasilkan pendapatan daerah dengan menggali sumber daya yang dimiliki daerah. Ini akan membantu pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan salah satu pendapatan daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 25. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah bahwa sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah terdiri dari hasil pajak daerah, pendapatan pengembalian daerah, hasil pengelolaan pemisahan kekayaan daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Yahaya & Agusta, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wulandari & Iryanie, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan agar dapat membantu menanggung beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan semakin meningkat sehingga kemandirian sebagai tujuan otonomi daerah dapat dilaksanakan (Handayani & Erinos, 2020). PAD adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firdausy, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut para ahli, yang di kutip dalam buku karangan Wulandari & Iryanie (2018) antara lain adalah :

1. Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena memberikan indikasi sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Menurut Warsito, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah kabupaten sendiri. Sumber PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.
3. Sedangkan menurut Herlina Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksud agar daerah dapat mendanai otonomi daerah yang bersumber dari potensial daerahnya sendiri. Melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Noorhidayanti, 2018). Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut (Nasir, 2019).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula diskresi daerah. Sesuai dengan otonomi daerah, dipadukan dengan keinginan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah, menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah tentunya harus berada dalam ruang lingkup peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam rangka pemanfaatan potensi daerah sebagai sumber pendapatan utama daerah. Ismail menyatakan bahwa tidak heran jika pendapatan fiskal daerah harus mampu menjadi pendukung kuat pembiayaan bagi pelaksanaan otonomi daerah, merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Jika potensi sebagai sumber pendapatan daerah dikelola secara profesional, efisien dan efektif, karena itu lebih mencerminkan tingkat otonomi (Saharudin, 2020).

Pendapatan Asli Daerah mempunyai beberapa fungsi dalam pelaksanaan program pemerintah pusat yaitu sebagai sumber untuk pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan sebagai penekan untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah melimpahkan dana APBD untuk pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam hal ini, suatu daerah dapat mengelola potensi yang dimiliki mulai dari alam hingga manusianya yang berguna untuk meningkatkan PAD (Sitompul, dikutip dalam Fatimah & Nuwun, 2020).

2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAD sendiri

memiliki sumber-sumber yang terbagi menjadi empat, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, dikutip dalam Hanafi et al. 2021). Pendapatan Asli Daerah Terdiri Dari :

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Siahan dikutip dalam Mimun (2021), ialah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Elwan, 2020).

Wulandari & Iryanie (2018) mengemukakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Maka dari itu, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Untuk pajak daerah, diantaranya ialah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, parkir, dan lain-lain (BPS Aceh, 2022).

Aly & Mamnun (2017) mengemukakan bahwa dalam Islam tidak ada namanya pajak, tetapi pajak menurut syariat disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul dan menerangkan atau membebaskan. Pajak (*dharibah*) kalau dilihat dari karakteristiknya, ia tergolong kepada kelompok besar sedekah yaitu sebagai kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang diwajibkan atas mereka kaum muslimin, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari bolehnya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang diwajibkan kaum muslimin dan adanya

suatu kondisi kekosongan kas Negara. Oleh karena itu, penerimaan dari pajak reklame perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta bernilai ibadah di hadapan Allah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sayuti, 2020). Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Edward M & Hutagalung, 2020). Penggolongan retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Martini et al. 2019).

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut (Fatimah dikutip dalam Mina & Ratna, 2020). Retribusi daerah juga dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun lain-lain PAD yang sah (Nurlian, dkk, 2018).

Sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan selain pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan asli daerah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Anggoro, 2017). Retribusi daerah meliputi; pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah

potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain (BPS Aceh, 2022).

3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-undang dalam Pasal 285 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan aset di wilayah pemisahan antara lain meliputi bagian keuntungan BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil dari pemisahan kekayaan ini ditentukan oleh peraturan daerah, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara khusus ditargetkan sebagai berikut: (1) bagi hasil pada perusahaan daerah/BUMD, (2) bagi hasil pada badan usaha milik negara/BUMN, dan (3) penyertaan pada swasta. bagi hasil perusahaan atau kelompok usaha (Raudhatinur & Ningsih, 2019).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam memenuhi kewajiban daerah untuk membiayai pengeluaran yang sedang berjalan dan biaya pembangunan daerah. Juga sebagai alat untuk menginvestasikan uang yang sebesar-besarnya ke kas daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi pengguna jasa. Tentu saja dalam hal ini keberadaan instansi terkait juga tidak dapat

dipisahkan, dan tugas pengawasan tidak dapat dilimpahkan. Dengan undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 3 PAD lain yang sah meliputi: a) bagi hasil perusahaan daerah, (b) bagi hasil lembaga keuangan perbankan, (c) bagi hasil lembaga keuangan bukan bank, dan (d) Laba saham atas laporan modal/investasi (Nasir, 2019).

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dasar hukum kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini. Pendapatan Asli Daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau daerah. Ekonomi Islam saat ini berkembang secara pesat di berbagai sektor. Eksistensinya di masyarakat menjadi fondasi yang kokoh dalam mempertahankan keberadaannya untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam implementasi ekonomi Syariah baik itu oleh intern lembaga pemerintah, maupun masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Peran pemerintah dalam melaksanakan ekonomi Syariah salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal biasanya dibuat oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dan pajak adalah dua alat penting tercermin dalam anggaran pemerintah yang mencakup

pengeluaran dan pendapatan (Alavi dkk, dikutip dalam Karbila et al. 2020).

Setiawan & Surtini (2017) mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada kemampuan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayahnya. Peningkatan potensi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin mandiri tingkat keuangan daerah tersebut, serta semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerahnya. Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT QS. An-Nisaa' (4): 59, sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿ (النساء)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri*

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59), (Kemenag, 2019)

Tafsir jalalain menjelaskan bahwa, (Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya). Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi saw. lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi saw. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si

munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah dibidang fiskal, yaitu berkenaan dengan urusan pajak dan keuangan daerah atau pendapatan daerah. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Fitriani & Irawan, 2019).

2.3. Penelitian Terkait

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk topik penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian-penelitian sebelumnya dipilih, dengan harapan dapat memberikan penjelasan dan referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Beberapa studi yang dipilih dijelaskan di bawah ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Pongsikabe & Hafizrianda (2018), yang berjudul "Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamberamo Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari organisasi perangkat daerah dan juga instansi vertikal berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010-2016

menyangkut Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Badan Pusat Statistik Provinsi Papua berupa realisasi Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini perangkat analisis yang dipakai adalah analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan perluasan dari regresi linear berganda dengan menggunakan software *Statistical Package for Sosial Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung Belanja Modal (x1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.119, dan pengaruh tidak langsung Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.127. pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.604 dan pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (x1) adalah sebesar 0.127 dengan total pengaruh adalah 0.977 atau sama dengan besarnya nilai *R Square* (R²).

Penelitian yang dilakukan oleh Wowiling et al. (2021), yang berjudul “Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mencari inovasi pelayanan yang sesuai dengan situasi dan kondisi demi meningkatkan penerimaan PAD. (2) bagaimana perbandingan penerimaan PKB dan BBNKB, sebelum dan sesudah inovasi pelayanan Samsat dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dari primer melalui wawancara dan data sekunder. Data yang digunakan adalah data piutang tahun 2015, data pendapatan daerah provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2019, data realisasi per triwulan tahun 2016-2019. Analisis data menggunakan analisis regresi real dan regresi dummy. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) inovasi memberikan peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan. (2) PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Selalu memberikan inovasi pelayanan yang diinginkan masyarakat wajib pajak, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemungut dan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Woyanti (2022) , yang berjudul “Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi, Pendapatan Sumber Sendiri (PAD) lokal, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tentang Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan data *cross sectional* terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat dan data deret waktu dari 2015 – 2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada yang positif (simultan) pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan PAD, Tenaga Kerja, dan juga IPM,

sedangkan Investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sementara sebagian, variabel PAD dan HDI memiliki positif dan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi variabel Tenaga Kerja memiliki positif tetapi tidak pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Variabel Investasi memiliki efek negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Harsono (2020), yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2018. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan data kuantitatif dengan sumber data yang digunakan data sekunder yang berupa *time series* pada periode tahun 2009-2018. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Amri (2020), yang berjudul “Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan dilihat dari penerimaan pemerintah daerah terdiri dari pajak daerah dan bagi hasil pajak, dan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja hibah dan bantuan sosial, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 28 provinsi selama periode 2005-2015, data dianalisis dengan menggunakan peralatan ekonometrika regresi panel pendekatan fixed-effect. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di sisi penerimaan, pajak daerah berpengaruh positif, dan sebaliknya, bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi pengeluaran, belanja hibah & sosial, dan belanja barang & jasa berpengaruh positif dan signifikan, dan sebaliknya belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wishartama et al. (2022), yang berjudul “Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (1999-2019) *Granger Causality*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kausalitas pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* dari tahun 1998-2019 yang diperoleh dari *World Bank* dan Badan Pusat Statistik, Model analisis yang digunakan adalah analisis *Granger Causality Test*. Berdasarkan hasil penelitian ini

bahwa perkembangan produk domestik bruto Indonesia berdasarkan hasil kausalitas *granger* mengalami kecenderungan mempengaruhi variabel *gini ratio* lebih lama daripada sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri & Hinaya, (2019), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan baik secara simultan maupun secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (*applied research*) dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan

variabelvariabel lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tolosang, (2018), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama- sama pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.

Penelitian yang dilakukan oleh Waskito et al. (2019), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Drajad (2020), yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau”. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Penelitian dilakukan dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan korelasi sebesar $-0,00467$. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 0,00467 persen. Dengan demikian bahwa hipotesis yang dikemukakan dapat diterima.

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No	Peneliti/Judul	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Pongsikabe & Hafizrianda, (2018) Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamberamo Tengah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung Belanja Modal (x1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.119, dan pengaruh tidak langsung Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.127.	Persamaan : Variabel : PAD dan Pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Objek dan subjek pelaksanaan penelitian berbeda

			<p>pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.604 dan pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (x1) adalah sebesar 0.127 dengan total pengaruh adalah 0.977 atau sama dengan besarnya nilai <i>R Square</i> (R²).</p>	
2	Wowiling et al. (2021), Analisis	Metode deskriptif	1) inovasi memberik	Persamaan : Variabel :

<p>Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p>	<p>kuantitatif</p>	<p>an peningkatan an realisasi penerimaan yang cukup signifikan. 2) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Selalu memberikan inovasi pelayanan yang diinginkan masyarakat wajib pajak, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemungut</p>	<p>PAD dan Pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Objek dan subjek pelaksanaan penelitian berbeda</p>
---	--------------------	--	---

			dan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban	
3	Riyadi & Woyanti (2022) Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat.	Kuantitatif menggunakan data sekunder	Hasil penelitian membuktikan bahwa ada yang positif (simultan) pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan PAD, Tenaga Kerja, dan juga IPM, sedangkan Investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sementara	Persamaan : Variabel : PAD dan Pertumbuhan ekonomi. Menggunakan data sekunder Perbedaan : Objek pelaksanaan penelitian berbeda

			<p>sebagian, variabel PAD dan HDI memiliki positif dan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi variabel Tenaga Kerja memiliki positif tetapi tidak pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Variabel Investasi memiliki efek negatif namun tidak signifikan terhadap</p>	
--	--	--	--	--

			Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	
4	Setiawan & Harsono (2020), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan	kuantitatif dengan sumber data yang digunakan data sekunder yang berupa <i>time series</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaan : Terdapat variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Objek pelaksanaa penelitian berbeda
5	Amri (2020), Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia	Menggunakan data panel	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di sisi penerimaan, pajak daerah berpengaruh positif, dan sebaliknya, bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan	Persamaan : Variabel pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Variabel Kebijakan Fiskal

			<p>ekonomi. Di sisi pengeluaran, belanja hibah & sosial, dan belanja barang & jasa berpengaruh positif dan signifikan, dan sebaliknya belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.</p>	
--	--	--	---	--



Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
6	Wishartama et al. (2022), Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (1999-2019) <i>Granger Causality</i> ”	Metode deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perkembangan produk domestik bruto Indonesia berdasarkan hasil kausalitas <i>granger</i> mengalami kecenderungan mempengaruhi variabel <i>gini rato</i> lebih lama daripada sebaliknya.	Persamaan : Variabel pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Variabel distribusi pendapatan di Indonesia
7	Syukri & Hinaya, (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y).	Persamaan : Variabel PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Perbedaan : Objek dan jenis variabel Y dalam penelitian berbeda

	<p>Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan</p>		<p>Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).</p>	
8	<p>Tolosang, (2018), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon</p>	<p>Data sekunder deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan</p>	<p>Persamaan : Persamaan variabel PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Perbedaan : Variabel Y dan objek penelitian berbeda</p>

			terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.	
9	Waskito et al. (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh	Persamaan : Objek penelitian dan Variabel PAD dan Pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Variabel terikat

	Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)		terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	
10	Kartika & Drajad (2020), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau.	Penelitian di lakukan dengan data sekunder	hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, yang di tunjukan dengan korelasi sebesar - 0,00467. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 0,00467 persen. dengan demikian bahwa hipotesis yang di kemukakan dapat di terima.	Persamaan : Variabel PAD dan Pertumbuhan ekonomi Perbedaan : Objek penelitian berbeda

Sumber : Data diolah (2022)

2.4.Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian Rori et al. (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Menurut Brata PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, dan penelitian Tambunan yang menyatakan bahwa PAD Secara berkelanjutan akan mendorong peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Daerah itu pertumbuhan ekonomi yang positif berpotensi meningkatkan PAD. Melihat hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal menciptakan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya mengeluarkan produk hukum terkait pajak dan biaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arina et al. (2019) dengan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal dalam proses pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2020) dengan hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tahar &

Zakhiya, (2011) menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.5. Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan manfaat dari tinjauan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diuraikan kerangka berfikir mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan yang masih bersifat sementara atau pernyataan yang didasarkan pada beberapa pengetahuan yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian ini dapat diturunkan dari latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori kemudian akan diuji. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak ada hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

Hi : Ada hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka yang menekankan pada hasil pengukuran yang objektif yang dilengkapi dengan analisis statistik. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian lengkap yang sistematis, terencana dengan baik dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga desain (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Combinesia, 2022). Adapun variabel tersebut ialah variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X) dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y).

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, Untuk memperoleh data sekunder, peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan penelitian atau subjek penelitian, melainkan dari data yang sudah tersedia. Bisa dari buku, jurnal, karya ilmiah peneliti sebelumnya, media cetak atau elektronik, dll (Kurniasari, 2021). Maka dari itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal atau artikel, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data yang digunakan berupa

data laporan PAD perkapita dan PDRB perkapita di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2020.

3.3. Populasi

Populasi adalah suatu bidang yang digeneralisasikan dari objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh seorang peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2020. Maka dari itu, yang digunakan sebagai sampel ialah seluruh anggota populasi dari 23 Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 8 tahun yakni 2013-2020. Daftar Kabupaten/Kota yang menjadi objek populasi dapat dilihat pada lampiran 1.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode kepustakaan.

3.4.1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mengkaji berbagai dokumen yang berguna untuk dianalisis. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain, seperti buku-buku, artiker, majalah dan tulisan di web site insternet, serta data dari BPS Provinsi Aceh, data yang digunakan berupa laporan PAD perkapita dan PDRB perkapita tahun 2013-2020.

3.4.2. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan ini membantu untuk mengetahui segala macam ilmu dan karya yang telah dicapai peneliti

sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan mencari buku atau referensi untuk membantu dan juga melengkapi data yang berhubungan dengan topik yang di teliti.

3.5. Operasional Variabel

3.5.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ialah data PAD Kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2013-2022 yang diukur dengan satuan rupiah perkapita.

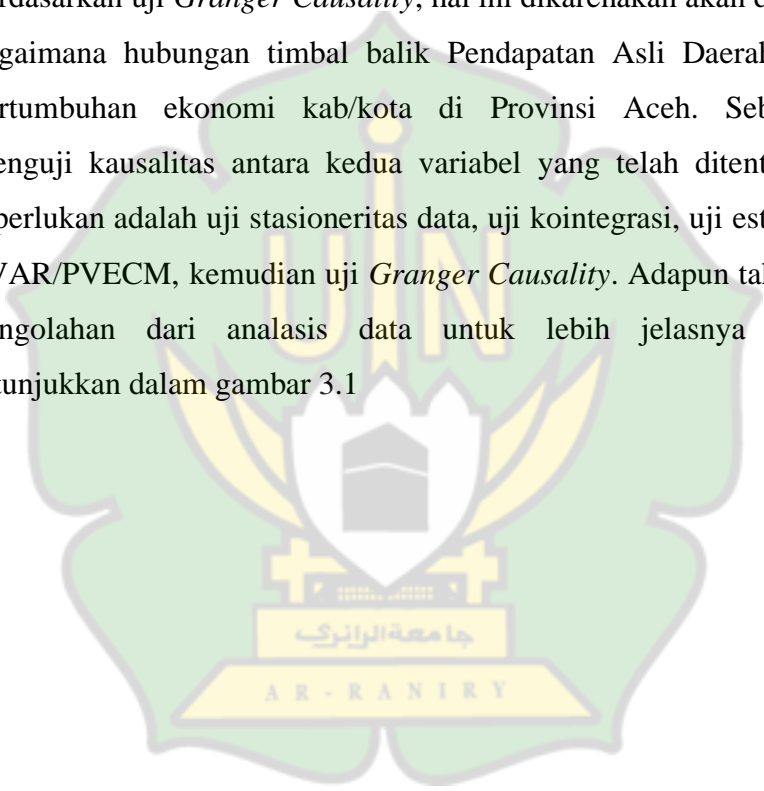
3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah satu proses di mana keluaran ekonomi terus meningkat atau keadaan ekonomi suatu daerah sentiasa berubah, yang dimanifestasikan sebagai peningkatan pendapatan daerah dalam jangka masa tertentu. PRDB sebagai indicator pertumbuhan ekonomi atau disebut juga dengan produk domestik regional bruto ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

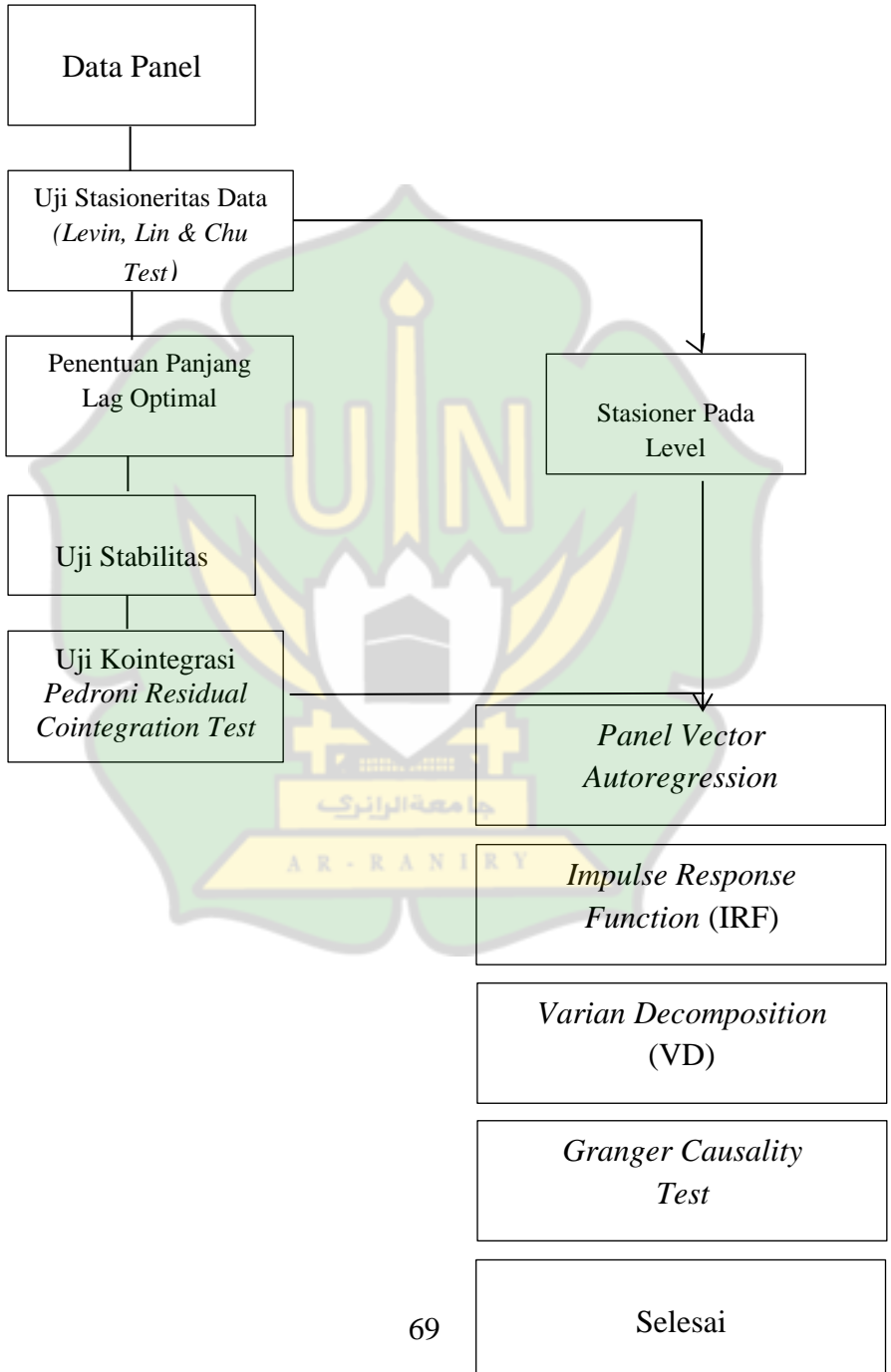
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini ialah PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berdasarkan harga konstan 2010 tahun 2013-2020 yang diukur dengan satuan rupiah perkapita.

3.6. Metode Analisis Data

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Aceh. Pada penelitian ini akan menggunakan metode analisis berdasarkan uji *Granger Causality*, hal ini dikarenakan akan diteliti bagaimana hubungan timbal balik Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Aceh. Sebelum menguji kausalitas antara kedua variabel yang telah ditentukan, diperlukan adalah uji stasioneritas data, uji kointegrasi, uji estimasi PVAR/PVECM, kemudian uji *Granger Causality*. Adapun tahapan pengolahan dari analisis data untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan dalam gambar 3.1



Gambar 3. 1
Tahapan Analisis Data



3.6.1. Uji Stasioneritas Data

Wullur et al. (2019) menjelaskan bahwa stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data runtut waktu (*time series*). Data stasioner adalah data yang menunjukkan *mean*, *varians* dan *autovarians* (pada variasi lag) tetap sama pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang stasioner model *time series* dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan *spurious regression*. *Spurious regression* adalah regresi yang memiliki R² yang tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya. Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui uji akar unit (*unit root test*). Uji ini merupakan pengujian yang populer, dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*.

Pengertian stasioneritas terkait dengan konsistensi pergerakan data *time series*. Suatu data runtun waktu dikatakan tidak stasioner bila nilai rata-rata dan varian bervariasi sepanjang waktu atau dengan kata lain data dikatakan stasioner bila data bergerak stabil dan konvergen sekitar nilai rata-ratanya tanpa mengalami fluktuasi pergerakan tren positif maupun negatif.

3.6.2. Penentuan Panjang Lag Optimum

Pemeriksaan *lag* digunakan untuk menentukan panjang *lag* optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter untuk model PVAR. Hal ini disebabkan karena estimasi hubungan kausalitas dan PVAR sangat peka terhadap panjang *lag*. *Lag* optimal merupakan jumlah *lag* yang memberikan pengaruh yang signifikan sehingga perlu untuk melihat data, kemudian ketepatan panjang *lag* (Ariyati, 2018).

Penentuan jumlah *lag* optimal yang digunakan merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam menggunakan model VAR. *Lag* optimal berguna untuk menunjukkan berapa lama reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya, serta untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam model VAR. Pengujian *lag* optimal dapat diidentifikasi dengan menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SIC), dan *Hannan-Quinn Criterion* (HQ) (Meilila, 2017).

3.6.3. Uji Stabilitas

Uji stabilitas digunakan untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi PVAR yang telah dibentuk maka dilakukan pengecekan kondisi PVAR *stability* berupa *roots of characteristic polynomial*. Suatu sistem PVAR dikatakan stabil apabila seluruh roots-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu

3.6.4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel-variabel. Jika variabel dalam model terdapat kointegrasi maka terdapat hubungan jangka panjang begitu

pula sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka tidak terdapat keterkaitan hubungan dalam jangka panjang (Ekananda, 2015).

3.6.5. Estimasi PVAR

Model *Vector Autoregressive* (VAR) biasanya digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Penggunaan VAR untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel dalam sistem dengan menambahkan *intercept*. Metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun 1980, yang mengasumsikan bahwa semua variabel dalam model bersifat endogen (ditentukan dalam model) sehingga metode ini disebut sebagai model yang teoritis (tidak berdasarkan teori) (Ekananda, 2015).

Pendekatan *Panel Vector Autoregression* (PVAR) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan VAR individu. Pertama, dapat menganalisa pengaruh waktu dan wilayah, Kedua dapat memodelkan hubungan antar wilayah, karena pendekatan panel menangkap heterogenitas antar wilayah. Salah satu kegunaan pengujian stasioneritas dan kointegrasi untuk menentukan metode VAR yang akan digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel stasioner atau tidak stasioner pada tingkat level (Ariyati , 2018).

3.6.7. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger merupakan sebuah metode analisis untuk mengetahui hubungan dimana disatu sisi suatu variabel

dependen (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi oleh variabel lain (independen variabel) dan disisi lain variabel independen tersebut dapat menempati posisi dependen variabel. Hubungan seperti ini sering disebut sebagai hubungan kausal. Setelah melakukan uji akar, selanjutnya melakukan uji Kausalitas Granger yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua arah, saling mempengaruhi. Dengan demikian, jika terjadi kausalitas di dalam perilaku ekonomi maka dalam model tidak terdapat variabel independen. Semua variabel merupakan variabel dependen (Wullur et al. 2019).

Analisis terkait model PVAR untuk menemukan hubungan sebab-akibat atau kausalitas antara variabel terikat. Amri & Nazamudin (2018) juga menjelaskan bahwa, uji kausalitas Granger tidak hanya digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Tetapi juga mampu menganalisis mana dari dua variabel yang muncul terlebih dahulu.

3.6.8. *Impulse Response Function*

Impulse Response Function (IRF) merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat seberapa lama guncangan (*shock*) dari suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lain dan juga menjelaskan seberapa lama variabel akan kembali ke titik keseimbangan setelah terjadi guncangan pada variabel lain.

3.6.9. *Variance Decompositions*

Variance Decompositions (VD) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar guncangan dari

sebuah variabel mempengaruhi variabel lain dan juga untuk menganalisis seberapa besar varian variabel dijelaskan oleh variabel itu sendiri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga data yang telah dideskripsi tersebut menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang akan memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan antar variabel.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

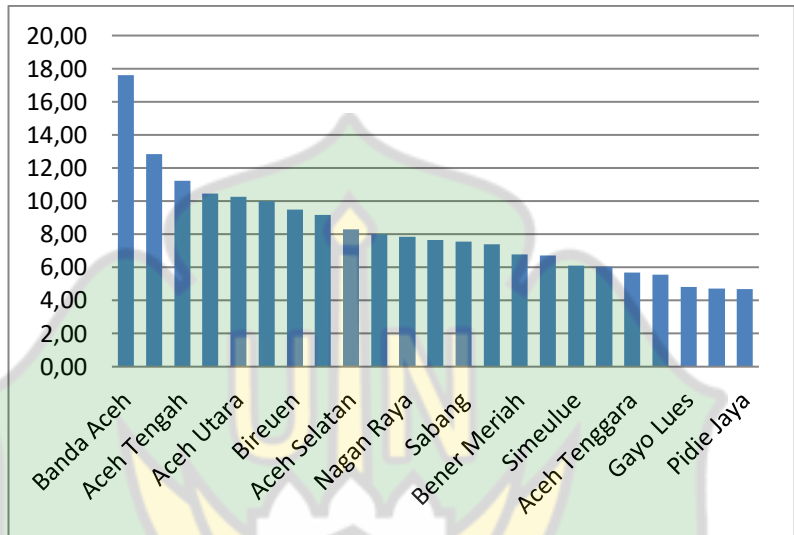
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi menjadi:

1. Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen.

2. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
3. Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
5. Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya

Gambar 4.1
Rata-rata Kontribusi Realisasi PAD Provinsi Aceh dan
Kabupaten/Kota
Dalam Provinsi Aceh Tahun 2013-2020 (Persen)



Sumber : BPS Aceh (2021)

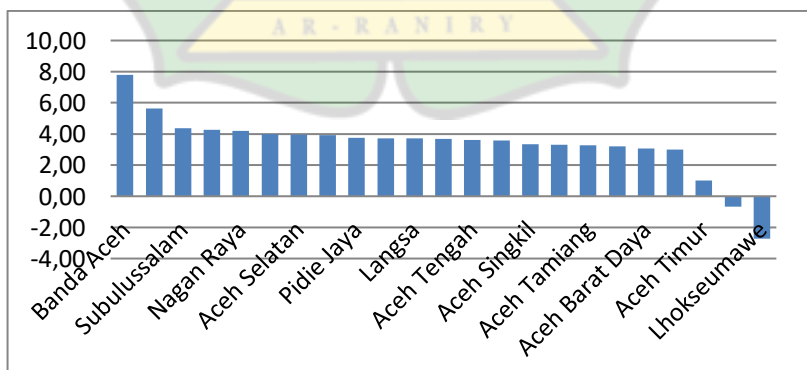
Berdasarkan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat digolongkan menjadi rendah sekali (0-25%), rendah (25- 50%), sedang (50-75%) dan tinggi (diatas 75%). Gambar 4.1 terlihat bahwa tingkat kemandirian Kabupaten/Kota rendah sekali dengan rata-rata sekitar 4-17 persen dalam kurun waktu 2013-2020. Tingkat kemandirian Kabupaten/Kota dengan tingkat 4 persen didapatkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Aceh Singkil, dan Gayo Lues. Dan tingkat kemadirian 10 persen ke atas antara lain Pemerintahan Kabupaten/Kota Aceh Barat, Aceh Utara, Pidie, Aceh Tengah, Langsa dan Banda Aceh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan dengan memperhatikan kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Adapun pertumbuhan dalam konteks ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Aceh
Dengan Migas (Persen) Tahun 2013-2020



Sumber : BPS Aceh (2021)

Berdasarkan Gambar 4.2, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota periode 2013-2020 paling tinggi adalah Banda Aceh, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Banda Aceh sebesar 7,80 persen, disusul Aceh Barat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonominya 5,70 persen. Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya berada di tingkat 2.00-4.00 persen. Aceh Timur dan Aceh Utara menjadi kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling lambat. Kota Lhokseumawe menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling sedikit, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sebesar -2,74 persen, hal ini disebabkan sumbangan dari PDRB atas harga konstan Kota Lhokseumawe turun secara drastis.

4.2. Analisis VAR

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peralatan analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah *Panel Vector Autoregression (PVAR)*. Maka uji yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

4.2.1. Uji Stasioneritas Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian pada umumnya cenderung mempunyai tren yang akan menyebabkan data tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi lancung (*spurious regression*), akibatnya estimasi yang dihasilkan akan tidak akurat, untuk mendapatkan estimasi yang baik maka data yang digunakan harus stasioner. Sehingga langkah

yang dilakukan dalam pengolahan data adalah dengan melakukan uji akar unit (*unit root tes*) dengan menggunakan metode *Levin, Lin & Chu test*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Akar Unit Menggunakan Metode *Levin, Lin & Chu Test*

Variabel	Individual Intercept and Trend			
	Statistic	Prob.* *	Total (balanced) observations	Cross- sections
PAD	- 7.21781	0.0000	138	23
PDRB	- 17.8123	0.0000	138	23

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Keterangan : PAD (Pendapatan Asli Daerah), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dengan persamaan *individual intercept and trend* kedua variabel dinyatakan stasioner. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *probability* masing-masing variabel sebesar 0.0000 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 0.0000 untuk pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil uji akar unit dengan menggunakan metode *Levin, Lin & Chu test* ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

4.2.2. Penentuan Panjang Lag Optimum

Estimasi model VAR dimulai dengan menentukan berapa panjang lag yang tepat dalam model VAR. Penentuan panjangnya lag optimal merupakan hal penting dalam pemodelan VAR. Jika lag optimal yang dimasukkan terlalu pendek maka dikhawatirkan tidak dapat menjelaskan kedinamisan secara menyeluruh. Namun,

lag optimal yang terlalu panjang akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien karena berkurang *degree of freedom* (Basuki, 2016). Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat perlu untuk mengetahui lag optimal sebelum melakukan estimasi VAR.

Tabel 4.2
Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	5.969494	7.462415	7.517236	7.484541
1	281.6953	0.274871	4.384256	4.548720	4.450635
2	17.51373 *	0.245211 *	4.269905 *	4.544012 *	4.380537 *
3	3.973908	0.255367	4.310109	4.693860	4.464994
4	2.274960	0.271215	4.369657	4.863050	4.568795

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Keterangan : tanda * lag optimal yang diajukan

Mengacu pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Lag 2 memiliki nilai *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC) dan *Hannan-Quinn Information* (HQ) terkecil. Artinya pengaruh optimal variabel terhadap variabel lain terjadi dalam horizon waktu 2 periode. Hal ini menunjukkan bahwa lag 2 akan digunakan untuk proses estimasi parameter *Panel Vector Autoregression* (PVAR).

4.2.3. Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini atau tidak.

Tabel 4.3
Hasil Uji Kointegrasi *Pedroni Residual Cointegration Test*

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)				
	Statistic	Prob.	Weighted Statistic	Prob.
Panel v-Statistic	0.536368	0.2959	0.580459	0.2808
Panel rho-Statistic	3.334178	0.9996	0.790574	0.7854
Panel PP-Statistic	5.142027	1.0000	0.187596	0.5744
Panel ADF-Statistic	1.868746	0.9692	-2.083799	0.0186

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)		
	Statistic	Prob.
Group rho-Statistic	3.276996	0.9995
Group PP-Statistic	2.125732	0.9832
Group ADF-Statistic	-2.561699	0.0052

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Uji kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan *Pedroni Residual Cointegration Test*. Suatu persamaan dikatakan terkointegrasi didasarkan pada nilai *probability* yang dihasilkan *Panel v-statistic*, *Panel rho-Statistic*, *Panel PP-Statistic*, *Panel PP-Statistic*, dan *Panel ADF-Statistic* dengan ketentuan apabila nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat kointegrasi (hubungan jangka panjang antara kedua persamaan). Sebaliknya jika nilai *probability* lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat kointegrasi antara kedua variabel. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *probability* untuk masing-masing nilai statistic tersebut lebih besar dari 0,05 seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3.

4.2.4. Uji Stabilitas Vector Autoregression

Pengujian stabilitas VAR menggunakan *Root of Characteristic Polymonial*. Ketika nilai dari *Root* dan *Modulus Polymonial* kurang dari 1(<1) berarti variabel tersebut stabil.

Tabel 4.4
Hasil Uji Stabilitas

Root	Modulus
0.940332	0.940332
0.831482	0.831482
0.085857	0.085857
-0.023351	0.023351

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 nilai dari *Root* dan *Modulus* kurang dari 1(<1), sehingga artinya model yang digunakan sudah stabil. Dengan demikian, hasil analisis IRF (*Impulse Response Function*) dan VD (*Variance Decomposition*) adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji kausalitas *granger*.

4.2.5. Hasil Uji Panel Vector Autoregression

Peralatan analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah *Panel Vector Autoregression* (PVAR) antara lain :

Tabel 4.5
Hasil Uji Panel Vector Autoregression

	PDRB	PAD
PDRB(-1)	0.919816	-0.000391
	(0.08712)	(0.00170)
	[10.5585]	[-0.22936]
PDRB(-2)	-0.097088	-0.000328

	(0.08819)	(0.00172)
	[-1.10093]	[-0.19001]
PAD(-1)	-5.472867	0.914504
	(3.69910)	(0.07235)
	[-1.47951]	[12.6398]
PAD(-2)	8.699222	0.045511
	(3.68166)	(0.07201)
	[2.36285]	[0.63201]
C	3.117264	0.072329
	(1.33723)	(0.02616)
	[2.33113]	[2.76539]
R-squared	0.714653	0.901445
Adj. R-squared	0.706071	0.898481
Sum sq. resids	2707.921	1.035942
S.E. equation	4.512240	0.088256
F-statistic	83.27490	304.1248
Log likelihood	-401.2046	141.7305
Akaike AIC	5.887024	-1.981602
Schwarz SC	5.993084	-1.875542
Mean dependent	21.75319	0.583406
S.D. dependent	8.322834	0.276992

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Keterangan : - Angka dalam () adalah standar error

- Angka dalam [] adalah nilai statistic

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu secara nyata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya (periode tertentu dalam artian misalnya 2018 di pengaruhi satu tahun atau dua tahun sebelumnya). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,919 dan nilai t statistic sebesar 10,558. Sebaliknya,

dampak pertumbuhan ekonomi pada dirinya sendiri dalam horizon waktu 2 periode adalah negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,097 dan nilai t statistik sebesar -1,100.

Nilai koefisien determinasi (*Adj. R-square*) dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya menunjukkan angka sebesar 0,706. Hal ini berarti bahwa sebesar 70,6 persen pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun tertentu dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada periode 1 dan 2 tahun sebelumnya. Besarnya persen pertumbuhan ekonomi itu sendiri juga diperkuat oleh nilai F statistik sebesar 83,27490. Hasil *Panel Vector Autoregresif* (PVAR) ditunjukkan dalam Tabel 4.5 di atas.

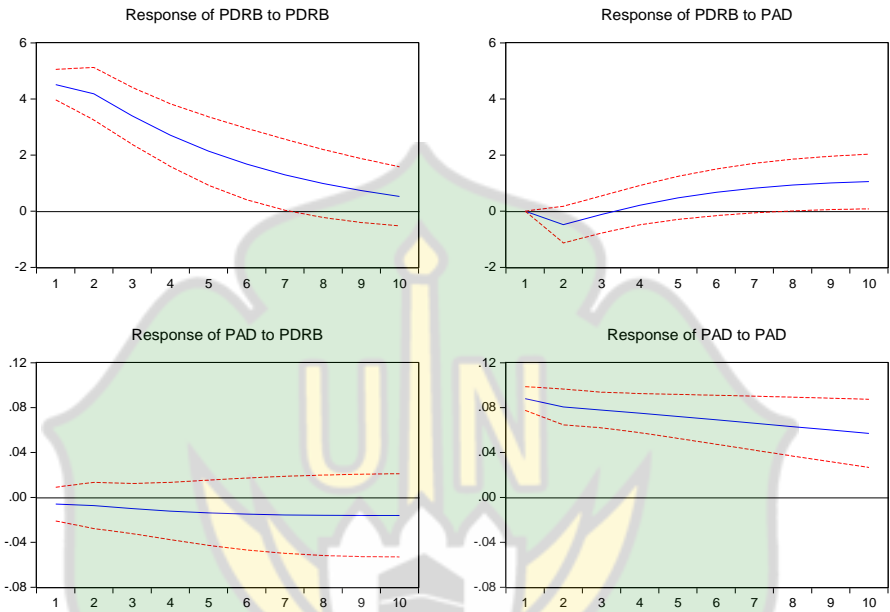
Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun sebelumnya, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,914 dan nilai t statistik sebesar 12,639. Artinya Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya. Dalam horizon waktu 2 periode, Pendapatan Asli Daerah tetap berpengaruh terhadap positif terhadap dirinya sendiri. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada horizon waktu 1 dan 2 periode sebesar 89,8 persen, ditunjukkan oleh nilai *Adj. R-square* sebesar 0,898.

4.2.6. Hasil analisis *Impulse Response Function* (IRF)

Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk menggambarkan respon variabel endogen dari waktu ke waktu terhadap guncangan (*shock*) variabel tertentu dan berapa lama guncangan tersebut terjadi. Sumbu horizontal merupakan variabel waktu dalam periode hari kedepan setelah terjadi *shock*, sedangkan sumbu vertikal adalah nilai respon. Secara mendasar dalam analisis ini akan diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jika *impulse response* menunjukkan pergerakan yang semakin mendekati titik keseimbangan (*convergence*) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya bermakna respon suatu variabel suatu kejutan makin lama akan menghilang sehingga kejutan tersebut tidak meninggalkan pengaruh permanen terhadap variabel tersebut (Basuki, 2016). Untuk memudahkan interpretasi, hasil analisis yang disajikan dalam bentuk grafik dengan 10 periode. Hasil pengujian ini berupa grafik dimana respon tersebut akan menunjukkan respon positif atau respon negatif dari variabel yang digunakan. Hasil *Impulse Response Function* (IRF) dapat dilihat pada berikut ini :

Gambar 4.3 Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Pada periode pertama respon pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada garis keseimbangan, pada periode kedua respon pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah negatif, pada periode ketiga kembali pada garis keseimbangan, kemudian pada periode keempat dan seterusnya respon pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah positif berada di atas garis keseimbangan. *Impulse response function* (IRF) antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dalam Gambar 4.1.

Respon Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dari periode ke satu dan seterusnya adalah negatif. Terjadinya kejutan (*shock*) pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah. Jika IRF berada diatas garis keseimbangan, maka respon variabel yang dianalisis adalah positif atau mengalami kenaikan, sedangkan jika grafik IRF berada dibawah garis keseimbangan, maka respon variabel adalah negatif atau mengalami penurunan. Ketika respon yang diberikan negatif, artinya Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Namun ketika respon yang diberikan positif artinya selama periode tertentu jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

4.2.7. Hasil Analisis *Varian Decomposition* (VD)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur komposisi atau kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. *Variance Decomposition* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian prediksi suatu variabel yang bersumber dari variabel inovasi. Variabel inovasi yang dimaksudkan baik berasal dari variabel itu sendiri maupun variabel lain yang ada dalam model. Hasil VD menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 2 tahun pertumbuhan ekonomi (PDRB), sekitar 99,390 persen varian dari prediksi bersumber dari variabel itu sendiri. Sisanya sebesar 0,609 persen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya pada horizon prediksi 10 tahun pertumbuhan ekonomi, sebesar 93,583 persen varian prediksi bersumber dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dan hanya 6,416 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki persentase yang sangat kecil dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenai *Variance Decomposition* (VD) dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Varian Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah

Periode	Persentase varian prediksi suatu variabel yang bersumber dari variabel inovasi					
	Varian Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi			Varian Dekomposisi Pendapatan Asli Daerah		
	S.E	PDRB	PAD	S.E	PDRB	PAD
1	4.51224 0	100.000 0	0.00000 0	0.08825 6	0.45692 7	99.5430 7
2	6.17176 5	99.3903 1	0.60968 5	0.11968 9	0.61224 1	99.3877 6
3	7.04595 7	99.5041 8	0.49581 6	0.14312 2	0.91510 7	99.0848 9
4	7.55233 2	99.4890 5	0.51094 6	0.16206 3	1.27673 0	98.7232 7
5	7.86476 5	99.1662 8	0.83371 7	0.17792 2	1.65632 1	98.3436 8
6	8.06978 8	98.5125 1	1.48749 3	0.19145 6	2.03219 7	97.9678 0
7	8.21454 8	97.5624 7	2.43752 5	0.20313 6	2.39238 4	97.6076 2
8	8.32566 5	96.3775	3.62249 6	0.21329 0	2.73045 3	97.2695 5
9	8.41819	95.0283	4.97167	0.22216	3.04333	96.9566

	1	2	6	0	4	7
10	8.50042 8	93.5838 7	6.41613 3	0.22993 3	3.33002 9	96.6699 7

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 5 tahun Pendapatan Asli Daerah, sekitar 98,343 persen varian prediksi bersumber dari variabel itu sendiri. Sisanya sebesar 1,656 persen bersumber dari pertumbuhan ekonomi. Hingga horizon prediksi 10 Pendapatan Asli Daerah, sekitar 96,669 persen varian prediksi bersumber dari variabel itu sendiri. Sedangkan varian prediksi yang bersumber dari pertumbuhan ekonomi sebesar 3,330.

4.2.8. Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas granger bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf uji yang digunakan dalam uji kausalitas *granger* ini yaitu pada tingkat kepercayaan 0.05 (5%) dan panjang lag sampai dengan lag 2 sesuai dengan pengujian lag optimum yang dilakukan. Dapat disimpulkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi kausalitas antar variabel, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka terjadi kausalitas antar variabel. *Panel Granger causality test* yang didasarkan pada model PVAR dapat digunakan untuk mengetahui arah kausalitas antara variabel yang dimasukkan dalam model. Hasil VAR *granger causality test* antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah dari penempatan asli daerah ke pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai χ^2 sebesar 8,8748 dengan nilai *probability* sebesar 0,0118. Sebaliknya tidak terdapat kausalitas dari

pertumbuhan ekonomi ke Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai x^2 sebesar 0,4931 dengan nilai *probability* sebesar 0,7815. Untuk lebih jelasnya mengenai VAR *granger causality test* dapat dilihat Tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Granger Causality Test

Dependent Variable	Independent Variable	
	PAD	PDRB
PDRB	[8.8748] (0.0118)	-
PAD	-	[0.4931] (0.7815)

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, secara empiris ditemukan arah kausalitas dari Pendapatan Asli Daerah ke pertumbuhan ekonomi. Artinya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Hubungan Kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh (2013-2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untk memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Perkembangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2020 pertahunnya ada yang meningkan dan ada juga yang mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil uji kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di provinsi Aceh Periode 2013-2020 dengan hasil yang di dapat adalah terdapat hubungan satu arah antara pedapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Yang artinya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Disebabkan oleh jumlah penduduk Aceh yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain di sumatera dan kemiskinan di Aceh, juga disumbang oleh tingginya angka pengangguran. Disamping itu, optimalisasi dari sumber daya masih rendah, karena kebanyakan produk-produk masyarakat masih belum diolah sehingga tidak mempunyai daya jual yang lebih tinggi, yang artinya hasil pertanian dan pertambangan yang ada di Aceh tidak adanya pengolahan tapi dijual bahan belum jadi sehingga tidak memberikan dampak atau nilai tambah pada sektor lain, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut maka harus adanya lompatan besar yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepengtingan dengan hadirnya industri pengolahan sehingga akan memberikan nilai tambah dan berdampak pada sektor lainnya. Oleh

karena itu, dengan kerja sama dan kalaborasi yang dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Aceh upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan terwujud seiring adanya nilai tambah pada setiap komoditas khususnya yang ada di setiap kawasan.

Temuan empiris yang menyajikan bukti empiris adanya hubungan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan temuan penelitian Setiawan & Harsono (2020) membuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Wullur et al. (2019) juga menyimpulkan bahwa dengan percepatan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan suatu daerah juga akan meningkat, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah provinsi tersebut, dan sebaliknya meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Demikian halnya dengan hasil kajian Wowiling et al. (2021) di Sulawesi Utara menemukan bahwa PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Riyadi & Woyanti (2022) juga menemukan bahwa variabel PAD dan HDI memiliki positif dan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan temuan penelitian Kartika & Drajad (2020) yang hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang di tunjukan dengan korelasi sebesar $-0,00467$. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi

meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 0,00467 persen. dengan demikian bahwa hipotesis yang di kemukakan dapat di terima.

Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan public semakin baik. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya.

4.3.2. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Provinsi Aceh

Dalam Pandangan Ekonomi Islam pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negara tersebut. Pembangunan dalam islam dalam Islam pula tidak hanya sebatas infrastruktur tetapi pembangunan secara moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pemerintah yang direalisasikan melalui keuangan publik. Karena agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapan dan belanja dengan baik.

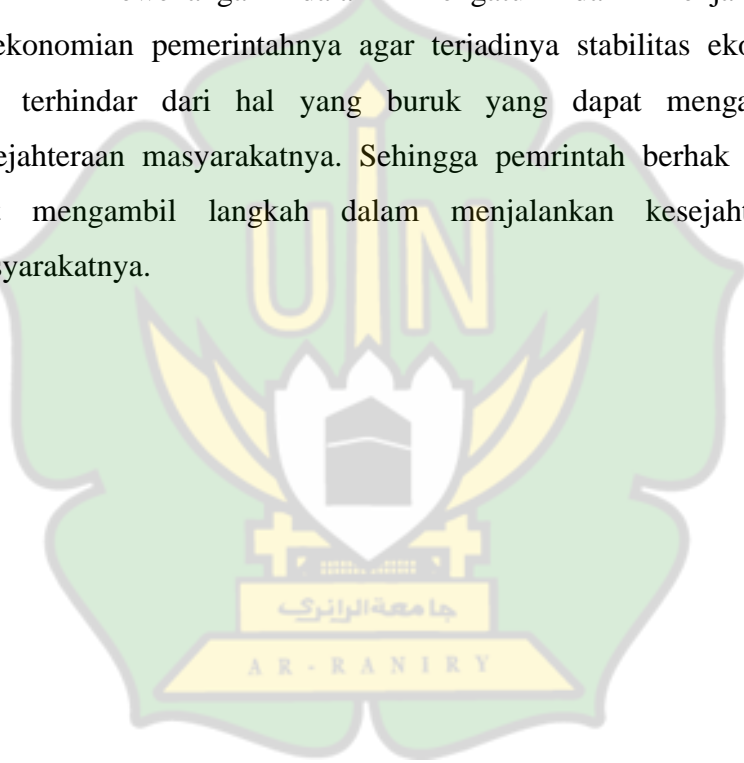
Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan pertumbuhan terus-

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Adapun tujuan syariah dalam pertumbuhan ekonomi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, menurut Muhammad Iswandi menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertama sumber daya manusia dan kedua teknologi. Sumber daya manusia tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan kompone dasar kualitas hidup. Sedangkan teknologi merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi.

Dari kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat IPM dan teknologi di Aceh dari tahun 2013-2020 sudah cukup baik. Hal tersebut dinyatakan di BPS Aceh

yang selalu meningkat di setiap tahunnya, begitu pula dengan teknologi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2013-2020 menjelaskan bahwa terdapat hubungan satu arah antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan perekonomian pemerintahnya agar terjadinya stabilitas ekonomi dan terhindar dari hal yang buruk yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintah berhak untuk ikut mengambil langkah dalam menjalankan kesejahteraan masyarakatnya.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel 23 Kab/kota di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu hanya dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Berdasarkan hasil *granger causality test*, hubungan kausalitas yang terjadi bersifat satu arah yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan maka tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menerapkan sistem pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, selain untuk kebahagiaan di dunia, di akhirat pun bisa terjamin bahagia. Karena dalam Islam dianjurkan jujur dalam segala dalam segala hal dan tujuan. Selain tujuan, dalam Islam juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor sumber daya manusia yang diukur dari IPM

dan faktor teknologi. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dilihat dari tingkat IPM dan Teknologinya Provinsi Aceh sudah cukup baik, karena tingkat IPM dan teknologinya setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

5.2.Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah penulis dapat. Maka penulis hendak memberikan saran kepada pihak yang terkait, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Bagi pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta pertumbuhan ekonominya. Melihat ada hubungan satu arah antar variabel yang signifikan, maka pemerintah Provinsi Aceh harus bisa meningkatkan lagi pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhannya.
2. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitiannya. Dan dikarenakan memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 8 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD dengan memilih atau menambah variabel

bebas lainnya dan penambahan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2021, September Minggu). *Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Ciri-Ciri, Faktor dan Metode Pengukurannya*. Retrieved Oktober Senin, 2022, from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pertumbuhan-ekonomi/>
- Aly, A. D., & Mamnun, A. (2017). Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka . *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 51-59.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan:Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 1-11.
- Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Amri, K., & Nazamudin. (2018). Is There Causality Relationship Between Economic Growth and Income Inequality ?: Panel Data Evidence From Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8-20.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Malang: UB Press.
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektifitas dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan . *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 7(2), 45-58.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Kota Manado . *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26-35.
- Ariyati , N. (2018). Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Pengangguran (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Atteng, J., Saerang, D., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 47-58.
- Azulaidin. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 30-34.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). *Statistik keuangan Pemerintah daerah Provinsi Aceh 2020-2021*.
- Basuki, A. (2016). *Analisis Regresi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPS Aceh. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020-2021*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Budi, O. (2020, April Senin). *Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved Oktober Senin, 2022, from Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi/>
- Combinesia. (2022). *Penelitian : Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh*. Retrieved Oktober 8, 2022, from Combinesia, Perpustakaan Online Indonesia: <https://combinesia.web.id/penelitian-adalah/#:~:text=Penelitian%20asosiatif%20merupakan%20penelitian%20yang%20bertujuan%20untuk%20mengetahui>

,asosiatif%20memiliki%20tingkatan%20tertinggi%20secara%20teoritis%20dan%20prakteknya.

- Darnawaty , F., & Purnasari, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Aspek Pendidikan Terhadap IPM di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 4(02), 17-25.
- Destiana, N. (2022, Januari Rabu). *Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Faktor, dan Ciri-cirinya*. Retrieved Oktober Senin, 2022, from Majoo: <https://majoo.id/solusi/detail/faktor-faktor-pertumbuhan-ekonomi>
- Edward M, & Hutagalung. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Bojongoreun: Alqaprint Jatinangor .
- Ekananda, M. (2015). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Elwan, L. M. (2020). Analisis Kebijakan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur di Era Otonomi Daerah. *Journal Publicuho*, 3(2), 247-266.
- Fajrin, V., & Sudarsono, H. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura . *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 21-33.
- Fatimah, A., & Nuwun, P. N. (2020). Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Journal Of Applied Accounting and Finance*, 4(2), 75-92.
- Faza, I. (2021, Juli 5). *Penelitian Kausal Komparatif*. Retrieved Oktober 8, 2022, from Rumah Indonesia Rumah Kita Bersama: <https://rumahindonesia.org/penelitian-kausal-komparatif/>

- Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriani, A., & Irawan, H. (2019). Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 39-49.
- Hanafi, A., Riyanto, W., & Kusuma, H. (2021). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 1-11.
- Handayani, T., & Erinoss. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- Ichsanti. (2022, Januari 2). *6 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved Oktober 4, 2022, from Akuntansi Lengkap Keuangan & Bisnis: <https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/6-faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi/>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201-208.
- Jawangga, Y. H. (2018). *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi : Ilmu Ekonomi Makro*. Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media.
- Karbila, I., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *Al-Muqayyad*, 3(2), 153-168.
- Kartika, A., & Drajad, D. A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Berau. *Economy Bring Ultimate Information all About Development Journal*, 4(1), 1-7.

Kemenag. (2019). Terjemahan Al-Qur'an.

Kurniasari, D. (2021, September 2). *Pahami Pengertian Data Sekunder dan Metode Pengolahan Datanya*. Retrieved Oktober 8, 2022, from DQLAB: <https://www.dqlab.id/pahami-pengertian-data-sekunder-dan-metode-pengolahan-datanya>

Lyman, C. (2021, September 9). *Rumus Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Retrieved Oktober 4, 2022, from Pintu Blog: <https://pintu.co.id/blog/rumus-pertumbuhan-ekonomi-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi>

Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan : Dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(1), 58-71.

Meilila, H. (2017). Analisis Performa Saham Konvensional dan Syariah Saat Krisis di Indonesia. *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor.

Mimun, M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 815-831.

Mina, M., & Ratna. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Regional Unimal*, 3(1), 39-51.

Montolalu, J., & M. Ruru, J. (2017). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan . *Jurnal Administrasi Bisnis UNSRAT*, 5(006), Paragraf 1.

- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). The Effect of Local Own Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditures of Regency Government. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 117-122.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah . *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Noorhidayanti. (2018). Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 325-338.
- Nurlian, Rofingatun, S., & Wamafma, I. (2018). Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* , 3(2), 84-100.
- Pojiah. (2022, Agustus 31). *Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Ciri dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Retrieved Oktober 4, 2022, from IDMETAFORA: <https://idmetafora.com/id/blog/read/1077/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-ciri-dan-faktor-yang-mempengaruhinya.html>
- Pongsikabe, R., & Hafizrianda, Y. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamberamo Tengah . *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, V(2), 1-19.
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah . *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* , 9(2), 152-164.

- Purba, R., & Ginting, R. H. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan . *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 1(1), 25-31.
- Pustikom, U. (2020, September 08). *Pertumbuhan Ekonomi – Pengertian, Teori dan Faktor Yang Mempengaruhi*. Retrieved Oktober 04, 2022, from Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/415-pertumbuhan-ekonomi-pengertian-teori-dan-faktor-yang-mempengaruhi>
- Raudhatinur, & Ningsih, E. S. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 441-455.
- Rezka, S. M. (2021, Februari 24). *Cara Memperoleh Data dengan Teknik Pengumpulan Data Sekunder*. Retrieved Oktober 8, 2022, from DQLAB: <https://www.dqlab.id/cara-memperoleh-data-dengan-teknik-pengumpulan-data-sekunder>
- Riyadi, M. D., & Woyanti, N. (2022). Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(1), 13-26.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analysis of The Influence of Local Own Revenue To Economic Growth In The Province of North Sulawesi In 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 243-254.
- Saharudin. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian

- Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10(2), 150-156.
- Sayuti, M. (2020). Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(2), 196-206.
- Setiawan, A., & Surtini, E. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur . *Jurnal Akunida* , 3(1), 54-70.
- Setiawan, D. A., & Harsono. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 71-85.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Ekuielmi : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 40-48.
- Suartha, N., & Yasa, I. M. (2017). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 95-107.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika* , 1(2), 183-191.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan . *Jurnal of Economic, Management and Accounting* , 2(2), 30-37.

- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah . *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(1), 88-99.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03), 79-92.
- Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(2), 128-142.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika* , 4(2), 101-113.
- Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.
- Wishartama, R. E., Zulgani, & Rosmeli. (2022). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia (1999-2019) Granger Causality. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 37-46.
- Wowiling, F. L., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2021). Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan SAMSAT Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah . *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(4), 32-42.

- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish .
- Wullur, R. O., Koleangan, R. A., & Niode, A. O. (2019). Analisis kausalitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3), 45-55.
- Yahaya, A. S., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba . *Journal of Applied Managerial Accounting* , 4(1), 33-41.
- Zuhdi, Z. (2008). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam . *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 4(2), Paragraf 1.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Panel

No	Kab/Kota	Tahun	PDRB Perkapita	PAD Perkapita
1	Simeulue	2013	14.332	0.18
		2014	14.716	0.43
		2015	15.089	0.52
		2016	15.570	0.54
		2017	16.066	0.67
		2018	16.561	0.68
		2019	17.168	0.85
		2020	17.255	1.04
2	Aceh Singkil	2013	12.488	0.15
		2014	12.715	0.28
		2015	12.916	0.35
		2016	13.200	0.36
		2017	13.398	0.36
		2018	13.681	0.37
		2019	13.950	0.36
		2020	13.545	0.36
3	Aceh Selatan	2013	15.122	0.17
		2014	15.520	0.36
		2015	15.894	0.41
		2016	16.362	0.55
		2017	16.763	0.61
		2018	17.283	0.65
		2019	17.823	0.59
		2020	18.249	0.58
4	Aceh Tenggara	2013	14.083	0.12
		2014	14.308	0.29
		2015	14.605	0.30
		2016	14.892	0.30
		2017	15.339	0.29

		2018	15.546	0.38
		2019	15.899	0.54
		2020	15.559	0.45
5	Aceh Timur	2013	20.096	0.11
		2014	19.551	0.22
		2015	18.016	0.24
		2016	17.448	0.23
		2017	17.845	0.38
		2018	18.248	0.40
		2019	18.682	0.42
		2020	19.585	0.47
6	Aceh Tengah	2013	24.356	0.37
		2014	24.818	0.68
		2015	25.356	0.81
		2016	25.947	0.78
		2017	26.486	0.80
		2018	27.045	0.72
		2019	27.468	0.90
		2020	26.756	0.90
7	Aceh Barat	2013	25.678	0.25
		2014	25.934	0.59
		2015	26.627	0.61
		2016	26.832	0.71
		2017	29.815	0.80
		2018	32.155	0.73
		2019	33.093	0.73
		2020	35.646	0.75
8	Aceh Besar	2013	20.886	0.17
		2014	21.279	0.30
		2015	21.685	0.36
		2016	22.096	0.34
		2017	22.521	0.36

		2018	22.913	0.38
		2019	23.465	0.40
		2020	24.700	0.47
9	Pidie	2013	14.937	0.19
		2014	15.321	0.36
		2015	15.742	0.50
		2016	16.081	0.59
		2017	16.535	0.62
		2018	16.966	0.54
		2019	17.485	0.55
		2020	17.852	0.49
10	Bireuen	2013	19.170	0.22
		2014	19.299	0.41
		2015	19.485	0.40
		2016	19.893	0.42
		2017	20.294	0.43
		2018	20.762	0.39
		2019	21.342	0.33
		2020	22.828	0.37
11	Aceh Utara	2013	31.549	0.18
		2014	30.012	0.31
		2015	26.006	0.34
		2016	25.604	0.64
		2017	25.798	0.34
		2018	26.636	0.49
		2019	27.208	0.45
		2020	28.231	0.38
12	Aceh Barat Daya	2013	17.741	0.24
		2014	17.579	0.42
		2015	17.836	0.44
		2016	18.308	0.56
		2017	18.808	0.63

		2018	19.358	0.56
		2019	19.969	0.60
		2020	19.790	0.74
13	Gayo Lues	2013	18.777	0.24
		2014	19.155	0.34
		2015	19.541	0.47
		2016	19.979	0.52
		2017	20.569	0.66
		2018	20.476	0.53
		2019	20.404	0.55
		2020	19.460	0.59
14	Aceh Tamiang	2013	18.162	0.16
		2014	18.377	0.36
		2015	18.448	0.36
		2016	18.661	0.40
		2017	19.132	0.41
		2018	19.663	0.48
		2019	20.285	0.44
		2020	20.415	0.43
15	Nagan Raya	2013	33.687	0.25
		2014	34.163	0.43
		2015	34.965	0.52
		2016	35.657	0.66
		2017	36.352	0.46
		2018	37.186	0.59
		2019	39.036	0.52
		2020	40.085	0.65
16	Aceh Jaya	2013	19.307	0.25
		2014	19.151	0.42
		2015	19.800	0.47
		2016	20.280	0.52
		2017	20.622	0.59

		2018	21.109	0.64
		2019	21.476	0.78
		2020	21.280	0.85
17	Bener Meriah	2013	21.406	0.10
		2014	21.859	0.33
		2015	22.442	0.43
		2016	22.922	0.48
		2017	23.418	0.58
		2018	23.962	0.59
		2019	24.475	0.52
		2020	22.498	0.43
18	Pidie Jaya	2013	14.038	0.10
		2014	14.277	0.21
		2015	14.653	0.29
		2016	14.919	0.30
		2017	15.445	0.31
		2018	15.823	0.36
		2019	16.150	0.43
		2020	16.308	0.50
19	Banda Aceh	2013	1.608	0.54
		2014	1.665	0.69
		2015	1.782	0.95
		2016	1.879	1.01
		2017	2.012	1.04
		2018	2.051	0.93
		2019	56.074	0.87
		2020	57.906	0.90
20	Sabang	2013	26.106	0.85
		2014	26.730	1.30
		2015	27.487	1.49
		2016	28.472	1.42
		2017	29.883	1.62

		2018	31.096	1.65
		2019	32.619	1.71
		2020	27.256	1.51
21	Langsa	2013	18.662	0.36
		2014	19.088	0.70
		2015	19.559	0.66
		2016	20.083	0.72
		2017	20.637	0.70
		2018	21.192	0.70
		2019	21.810	0.65
		2020	20.504	0.68
22	Lhokseumawe	2013	48.453	0.20
		2014	43.863	0.26
		2015	34.221	0.30
		2016	33.047	0.29
		2017	33.127	0.32
		2018	33.651	0.32
		2019	34.327	0.30
		2020	37.012	0.35
23	Subulussalam	2013	14.334	0.11
		2014	14.739	0.34
		2015	15.087	0.48
		2016	15.406	0.55
		2017	15.829	0.72
		2018	16.221	0.49
		2019	16.688	0.64
		2020	15.266	0.63

Lampiran 2: Hasil Output Eviews

1.1. Uji Stasioneritas data

1. PAD Levin, Lin & Chu Test

Level

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: PAD

Date: 03/04/23 Time: 11:47

Sample: 2013 2020

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends

User-specified lags: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 138

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
Levin, Lin & Chu t*	-7.21781	0.0000

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Intermediate results on PAD

Cross section	2nd Stage Coefficient	Variance of Reg	HAC of		Max Lag	Bandwidth	Obs
			Dep.	Lag			
1	-1.60893	0.0020	0.0046	1	1	3.0	6
2	-0.95787	1.E-05	0.0008	1	1	2.0	6
3	0.38031	0.0007	0.0002	1	1	6.0	6
4	-1.97990	0.0013	0.0012	1	1	6.0	6
5	-2.41113	0.0003	0.0004	1	1	5.0	6
6	-1.49009	0.0019	0.0103	1	1	2.0	6
7	-0.56248	0.0013	0.0014	1	1	6.0	6
8	-1.37857	0.0002	0.0014	1	1	3.0	6
9	-0.46515	0.0007	0.0003	1	1	6.0	6
10	-0.99225	0.0005	0.0008	1	1	6.0	6
11	-1.19254	0.0085	0.0042	1	1	3.0	6
12	-1.26186	0.0022	0.0011	1	1	6.0	6
13	-0.78576	0.0027	0.0007	1	1	6.0	6
14	-0.51023	0.0006	0.0008	1	1	3.0	6

15	-1.41027	0.0032	0.0068	1	1	1.0	6
16	-1.21218	0.0004	0.0010	1	1	3.0	6
17	0.18461	0.0008	0.0002	1	1	5.0	6
18	-1.18033	2.E-05	0.0013	1	1	2.0	6
19	-0.75980	0.0010	0.0017	1	1	4.0	6
20	-1.34865	0.0070	0.0025	1	1	6.0	6
21	-1.04163	0.0001	0.0068	1	1	1.0	6
22	-1.61614	0.0001	0.0001	1	1	6.0	6
23	-1.01715	0.0049	0.0018	1	1	6.0	6
<hr/>							
	Coefficient	t-Stat	SE Reg	mu*	sig*		Obs
Pooled	-0.93090	-14.701	1.281	-0.703	1.003		138

2. PDRB Levin, Lin & Chu Test Level

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: PDRB

Date: 03/04/23 Time: 11:50

Sample: 2013 2020

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends

User-specified lags: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 138

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
Levin, Lin & Chu t*	17.8123	0.0000

** Probabilities are computed assuming asymptotic normality

Intermediate results on PDRB

Cross section	2nd Stage Variance Coefficient	Variance of Reg	HAC of Dep.	Lag	Max Lag	Bandwidth	Obs
1	-1.97264	0.0049	0.0125	1	1	3.0	6

2	-12.2676	0.0074	0.0148	1	1	4.0	6
3	-0.73768	0.0011	0.0004	1	1	6.0	6
4	-0.88309	0.0363	0.0420	1	1	0.0	6
5	-0.49854	0.0151	0.0236	1	1	6.0	6
6	6.55627	0.0086	0.0993	1	1	2.0	6
7	-0.95033	0.3309	0.1055	1	1	6.0	6
8	10.4453	0.0031	0.0287	1	1	3.0	6
9	-0.55465	0.0014	0.0014	1	1	1.0	6
10	1.56477	0.0305	0.0206	1	1	4.0	6
11	-0.69436	0.0070	0.1517	1	1	6.0	6
12	-6.11214	0.0113	0.0938	1	1	1.0	6
13	1.29751	0.0412	0.0891	1	1	0.0	6
14	-1.14990	0.0074	0.0102	1	1	4.0	6
15	0.54547	0.0785	0.0109	1	1	6.0	6
16	1.21812	0.0227	0.0256	1	1	5.0	6
17	-33.2754	0.3915	0.2821	1	1	3.0	6
18	-1.55483	0.0063	0.0118	1	1	0.0	6
19	633.260	89.226	33.119	1	1	6.0	6
20	-6.44800	1.9151	3.0149	1	1	2.0	6
21	-13.3679	0.0380	0.1732	1	1	3.0	6
22	-0.68019	0.1724	0.6493	1	1	6.0	6
23	-14.6137	0.0828	0.1495	1	1	3.0	6
							Obs
Pooled	-0.68312	-20.259	1.459	-0.703	1.003	138	

2.2. Penentuan Panjang Lag

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: PDRB

PAD

Exogenous variables: C

Date: 03/04/23 Time: 12:29

Sample: 2013 2020

Included observations: 92

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
-----	------	----	-----	-----	----	----

0	341.2711	NA	5.969494	7.462415	7.517236	7.484541
1	195.6758	281.6953	0.274871	4.384256	4.548720	4.450635
2	186.4156	17.51373*	0.245211*	4.269905*	4.544012*	4.380537*
3	184.2650	3.973908	0.255367	4.310109	4.693860	4.464994
4	183.0042	2.274960	0.271215	4.369657	4.863050	4.568795

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

2.3. Uji Kointegrasi Pedroni Residual Cointegration Test

Pedroni Residual Cointegration Test

Series: PDRB PAD

Date: 03/04/23 Time: 20:58

Sample: 2013 2020

Included observations: 184

Cross-sections included: 23

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: No deterministic trend

User-specified lag length: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

	Statistic	Prob.	Weighted	
			Statistic	Prob.
Panel v-Statistic	0.536368	0.2959	0.580459	0.2808
Panel rho-Statistic	3.334178	0.9996	0.790574	0.7854

Panel PP-Statistic	5.142027	1.0000	0.187596	0.5744
Panel ADF-Statistic	1.868746	0.9692	-2.083799	0.0186

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Group rho-Statistic	3.276996	0.9995
Group PP-Statistic	2.125732	0.9832
Group ADF-Statistic	-2.561699	0.0052

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	HAC Bandwidth	Obs	
1	0.156	0.102227	0.121642	1.00	7
2	0.535	0.069255	0.069255	0.00	7
3	0.824	0.230345	0.322259	1.00	7
4	0.369	0.086737	0.093146	2.00	7
5	0.545	0.499883	0.688527	1.00	7
6	0.516	0.379661	0.379661	0.00	7
7	0.757	5.357540	6.796523	1.00	7
8	0.351	0.232328	0.340050	1.00	7
9	1.097	0.227295	0.478990	2.00	7
10	1.203	0.418166	0.928197	2.00	7
11	-0.292	1.761208	1.386886	1.00	7
12	0.318	0.262498	0.262498	0.00	7
13	-0.088	0.141164	0.036670	6.00	7
14	0.654	0.263314	0.339002	1.00	7
15	0.581	2.232508	2.164276	1.00	7
16	0.017	0.104125	0.128337	1.00	7
17	-0.031	0.272847	0.272847	0.00	7
18	0.360	0.058326	0.058326	0.00	7
19	0.756	405.8194	405.8194	0.00	7
20	-0.131	1.797465	1.889961	1.00	7
21	0.527	0.588668	0.588668	0.00	7
22	0.079	10.66916	8.925998	2.00	7

23 0.095 0.269751 0.084051 6.00 7

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	Lag	Max lag	Obs
1	-0.088	0.057817	1	--	6
2	0.196	0.029937	1	--	6
3	0.491	0.125527	1	--	6
4	0.089	0.030210	1	--	6
5	0.242	0.227371	1	--	6
6	0.259	0.129055	1	--	6
7	0.738	3.057662	1	--	6
8	0.441	0.070444	1	--	6
9	0.647	0.060018	1	--	6
10	0.962	0.069816	1	--	6
11	-0.497	1.330065	1	--	6
12	0.123	0.148409	1	--	6
13	-0.895	0.074427	1	--	6
14	0.646	0.139806	1	--	6
15	0.683	2.239938	1	--	6
16	-0.004	0.040046	1	--	6
17	-0.461	0.241533	1	--	6
18	0.090	0.005970	1	--	6
19	0.160	385.2377	1	--	6
20	-0.524	1.483274	1	--	6
21	0.302	0.383499	1	--	6
22	-0.283	9.857281	1	--	6
23	-0.607	0.154636	1	--	6

2.4. Uji Stabilitas Panel VAR

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: PDRB PAD

Exogenous variables: C

Lag specification: 1 2

Date: 03/05/23 Time: 21:04

Root	Modulus
0.940332	0.940332
0.831482	0.831482
0.085857	0.085857
-0.023351	0.023351

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

2.5. Uji Panel Vector Autoregression (PVAR)

Vector Autoregression Estimates

Date: 03/05/23 Time: 21:23

Sample (adjusted): 2015 2020

Included observations: 138 after adjustments

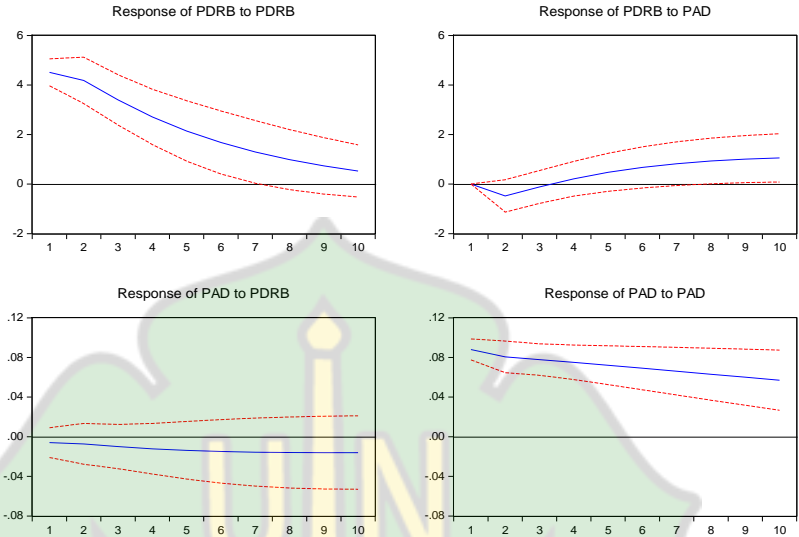
Standard errors in () & t-statistics in []

	PDRB	PAD
PDRB(-1)	0.919816 (0.08712) [10.5585]	-0.000391 (0.00170) [-0.22936]
PDRB(-2)	-0.097088 (0.08819) [-1.10093]	-0.000328 (0.00172) [-0.19001]
PAD(-1)	-5.472867 (3.69910) [-1.47951]	0.914504 (0.07235) [12.6398]
PAD(-2)	8.699222 (3.68166) [2.36285]	0.045511 (0.07201) [0.63201]

C	3.117264 (1.33723) [2.33113]	0.072329 (0.02616) [2.76539]
R-squared	0.714653	0.901445
Adj. R-squared	0.706071	0.898481
Sum sq. resids	2707.921	1.035942
S.E. equation	4.512240	0.088256
F-statistic	83.27490	304.1248
Log likelihood	-401.2046	141.7305
Akaike AIC	5.887024	-1.981602
Schwarz SC	5.993084	-1.875542
Mean dependent	21.75319	0.583406
S.D. dependent	8.322834	0.276992
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.157863
Determinant resid covariance		0.146630
Log likelihood		-259.1581
Akaike information criterion		3.900842
Schwarz criterion		4.112962

2.6. Hasil Analisis Impulse Response Function (IRF)

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



2.7. Hasil Analisis Varian Decomposition (VD)

Variance Decomposition of
PDRB:

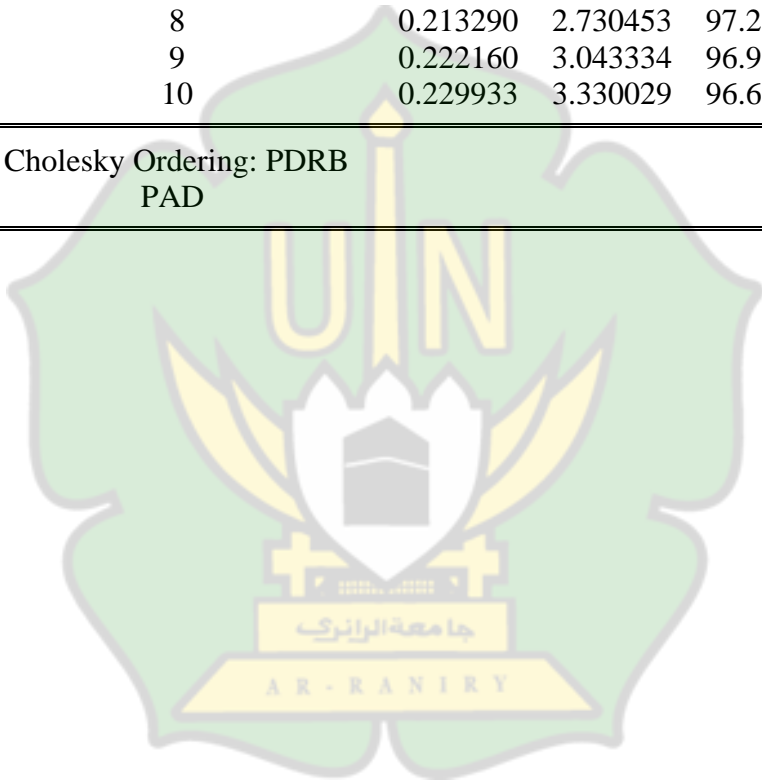
Period	S.E.	PDRB	PAD
1	4.512240	100.0000	0.000000
2	6.171765	99.39031	0.609685
3	7.045957	99.50418	0.495816
4	7.552332	99.48905	0.510946
5	7.864765	99.16628	0.833717
6	8.069788	98.51251	1.487493
7	8.214548	97.56247	2.437525
8	8.325665	96.37750	3.622496
9	8.418191	95.02832	4.971676
10	8.500428	93.58387	6.416133

Variance Decomposition of
PAD:

Period	S.E.	PDRB	PAD
--------	------	------	-----

1	0.088256	0.456927	99.54307
2	0.119689	0.612241	99.38776
3	0.143122	0.915107	99.08489
4	0.162063	1.276730	98.72327
5	0.177922	1.656321	98.34368
6	0.191456	2.032197	97.96780
7	0.203136	2.392384	97.60762
8	0.213290	2.730453	97.26955
9	0.222160	3.043334	96.95667
10	0.229933	3.330029	96.66997

Cholesky Ordering: PDRB
PAD



2.8. Hasil Uji Kausalitas Granger

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Date: 03/09/23 Time: 02:40

Sample: 2013 2020

Included observations: 138

Dependent variable: PDRB

Excluded	Chi-sq	Df	Prob.
PAD	8.874831	2	0.0118
All	8.874831	2	0.0118

Dependent variable: PAD

Excluded	Chi-sq	Df	Prob.
PDRB	0.493143	2	0.7815
All	0.493143	2	0.7815